

**PERANAN PEREMPUAN RWANDA
DALAM PROSES PERDAMAIAN
PASCA GENOSIDA 1994**

SKRIPSI



Oleh :

EKY NANDA NUZULUL
151070205

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2011**

**PERANAN PEREMPUAN RWANDA
DALAM PROSES PERDAMAIAN
PASCA GENOSIDA 1994**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional**



**EKY NANDA NUZULUL
151070205**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2011**

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tulisan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiat, maka saya siap menerima sanksi akademik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juni 2011

EKY NANDA NUZULUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : EKY NANDA NUZULUL
N.I.M : 151 070 205
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PEREMPUAN RWANDA DALAM PROSES
PERDAMAIAN PASCA GENOSIDA 1994

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan tim penguji
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Juni 2011
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Dosen Pembimbing I

(DR. MACHYA ASTUTI DEWI)

Dosen Pembimbing II

(SRI ISSUNDARI, SIP. M.Hum)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Gambar.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Asumsi Dasar.....	23
F. Metode Penelitian.....	23
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	24
H. Batasan Penelitian.....	24
I. Rencana Sistematika Penelitian.....	25

BAB II

GENOSIDA RWANDA 1994 DAN PENDERITAAN PEREMPUAN

RWANDA.....	26
A. Genosida Rwanda 1994.....	26
B. Kronologis Kejadian Genosida 1994.....	28
C. Pihak- Pihak Yang Terlibat dalam Peristiwa Genosida.....	32
D. Penderitaan Perempuan Pasca Genosida 1994.....	36
E. Proses Peace Building.....	43

BAB III

PERANAN PEREMPUAN RWANDA DALAM BIDANG

POLITIK.....48

- A. Dukungan Pemerintah Rwanda Terhadap Partisipasi Perempuan...48**
- B. Peran Perempuan di Parlemen.....53**
- C. Organisasi Berbasis Perempuan di Rwanda.....63**
- D. Sumbangan Perempuan Dalam Pemeliharaan Keamanan.....71**

BAB IV

PERANAN PEREMPUAN RWANDA DALAM BIDANG SOSIAL DAN

EKONOMI.....76

- A. Perempuan Mempelopori Inisiatif Sosial Ekonomi.....76**
- B. Rekonstruksi Ekonomi dan Sosial oleh Perempuan80**
- C. Kegiatan Meningkatkan Perekonomian dan Kehidupan Sosial82**

BAB V

KESIMPULAN.....91

Daftar Pustaka

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Korban Genosida.....	41
Gambar 2.2 Perempuan Membudidayakan Tanaman kentang.....	47
Gambar 2.3 Prosesi Pengadilan dan Juri Pengadilan Gacaca.....	48
Gambar 3.1 Immaculate Ingabire	52
Gambar 3.2 Perempuan Rwanda	53
Gambar 3.3 Perempuan Berkampanye	53
Gambar 3.4 Anggota ProFemmes	54
Gambar 3.5 Anggota Parlemen Perempuan.....	61
Gambar 4.1 Anggota Koperasi Ngwino Urebe Association.....	80
Gambar 4.2 Pembangunan Infrastruktur Imidugudu	83
Gambar 4.3 Proyek “Cows of Peace”.....	86

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan karunia yang terus-menerus tanpa henti, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca Genosida 1994”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, dari lubuk hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu DR. Machya Astuti Dewi, M. Si. Selaku dosen Pembimbing I.
Terimakasih atas bimbingannya, kesediaan ibu dalam memberikan banyak waktu, membalas setiap sms saya, serta kesabaran ibu dalam memberikan pengertian kepada saya sehingga skripsi ini bisa berjalan lancar.
2. Ibu Sri Issundari, SIP, M. Hum. Selaku dosen Pembimbing II.
Terimakasih atas pengertian dan kemudahan yang ibu berikan pada saya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan cepat.
3. Bapak Asep Saepudin, SIP, M. Si. Selaku dosen Penguji Skripsi.
Terimakasih karena bapak sudah banyak membantu saya sejak

pertama kali saya masuk UPN ‘Veteran’ Yogyakarta hingga saat menjadi dosen penguji skripsi saya.

4. Seluruh Staf Administrasi Jurusan Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat ujian.
5. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, walaupun begitu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Juni 2011

Penulis,

EKY NANDA NUZULUL



MOTTO

*BE YOURSELF AND BELIEVE THAT
YOU CAN DO THE BEST THINGS FOR
EVERYONE WHO LOVES YOU*

*KEBERANIAN ADALAH KESADARAN
BAHWA KAU TAK BISA MENANG DAN
MENCOBA KETIKA KAU TAU KAU
BISA KALAH*

*JANGAN KAU SESALI YANG SUDAH
TERJADI, TAPI PERBAIKILAH APA
YANG TELAH TERJADI, DAN,
COBALAH UNTUK MEMBIARKAN
SEMUA BERLALU DAN MENJADI
KENANGAN DI HATI..*

(EKY NANDA)

Thanks to..



ALLAH

SWT

Subhanallah..Alhamdulillah..Puji Syukur kupanjatkan kehadiranMu yaa Tuhanku..akhirnya skripsi yang penuh dengan derai air mata, emosi dan kegundahan hati ku ini bisa ter-ACC juga..tak ka nada hentinya ku mengucapkan syukur atas keridhaan Mu yaa Tuhan..



Mama Nany Wibaryanti dan Papa Arman Yanuar.. mama, walaupun papa ga kasih restu untuk kaka kuliah di univ swasta, tapi mama tetap dukung kaka..kaka cinta mama beuuutt.. papa, meskipun kaka ga jadi dapet gelar Sarjana Pertanian, tapi kaka punya gelar Sarjana Ilmu Politik pa, gapapa ya...kayanya lebih keren kok..hehe..pokoknya, syukur Alhamdulillah



kaka punya orang tua yang luar biasa seperti
kalian..love u so much..

❧ Adik-adik ku, Nanda Deska Maulana, Nanda
Arya Aulia, Oktadiani Vidya Nanda , jadilah
kebanggaan orang tua, kaka belum ada apa-apanya
untuk dijadikan contoh teladan buat kalian..kucingku
yang manis Kitty Nanda dan almarhumah kucingku
Twinkle Nanda kalian selalu mengisi hatiku dengan
kehangatan yang luar biasa..

❧ Tunanganku yang segera akan menjadi suamiku
November ini.. Anhika Patra, SE. Kesabaran mu,
pengertian mu, pengorbanan mu sungguh aku hargai
sayang.. berkat semangat dari mu akhirnya aku bisa
menyelesaikan salah satu tanggung jawabku pada orang
tuaku..and after all, lets grow old together abi

❧ Teman-teman Jogja ku, Miss Fera 'Miss Agila'
makasi ya udah mau nenenin aku bobo.. Immaculata

I'd like to run away from you
But if you didn't come and find me
I would die..

Wenti and my yuyun yang terjadi tapi kita pernah sedekat
itu makasi say.. Nur 'nce' Rini makasi udah mau
denger keluhanku.. keluarga kecil bahagia Lia, Rio dan
beby Keola yang selalu gemesin aku bakal kangen
kalian.. Apriandari-Min yang selalu nemenin makan..
Aulrida Aum, de Lita, mba Afi, Fida n
Yuyun..Thanks all for every single moment with you
girls..

☞ Teman-teman I Class '07 KS UPN Jogja..

Kadek 'Adhe' Ria gagal aku wisuda bareng kamu dhe
makasi udah nemenin dari semester 1-akhir dengan rekor
semua mata kuliah yang kita ambil selalu sama.. Ayu
'Nci Memey' ayo sayang semangat mulai buat judul
yah akhir taun harus udah wisuda.. Gank 'Klethenz',
Sin septiani, Pinil, Septi, Ditto, Remon, Mitha
'Pinky' and the gank.. dan semuanya yang aku lupa
namanya..hehe..semangat guys..

A woman with long dark hair is holding two rabbits. One rabbit is white with black spots, and the other is white with brown spots. She is looking down at the rabbits with a gentle expression.

☞ Teman-teman **FAPERIA UNSOED 2004**,

hanya 3 Tahun kita bersama, itupun aku ga pernah kuliah..hahaha..aku masih inget **NIM** ku, **A1BOO4001** nomer yang aku dapet karena menang lotere masuk **UNSOED** berkat **PMDK**, hahaha..

☞ Kompy itemku, laptly Acer Gatra, and mini laptly Pico ku..terimakasih kalian mau ikut bekerja keras bersamaku..

☞ Si garang nan gagah **Mio item E 4988 RN**, hahahaaa.. makasi beb udah nemenin aku ngukur jalanan Jogjakarta yang indah ini..maap ga pernah di servis n dimandiin (-___-“)

☞ And for anyone who helped me in this minithesis.. thank you..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Untuk dapat memiliki wawasan yang jelas dan realistis tentang peranan perempuan di Rwanda yang telah memainkan upaya pembangunan perdamaian, sangatlah dibutuhkan kajian yang jelas dengan melihat semua kejadian genosida pada tahun 1994 dan keadaan setelahnya. Genosida menyebabkan perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Diperkirakan lebih dari 250.000 perempuan Rwanda menjadi korban sejumlah bentuk kekerasan seksual¹. Hal ini disebabkan sebagian besar yang orang meninggal, tidak pernah kembali ke Rwanda karena melarikan diri, atau dipenjarakan karena tuduhan genosida adalah laki-laki.

Genosida Rwanda memiliki keunikan yang tidak sama seperti genosida Yahudi atau Armenia yang dilakukan terhadap rekan satu negara, aktor utama yang merupakan elit politik, militer, dan keagamaan. Umumnya, dalam konflik dan peperangan perempuan sebagai kategori sosial tidak ikut aktif atau tidak berpartisipasi dalam berbagai bentuk peperangan, mereka hanya merupakan agen pendamai, pendukung dan pengasuh hidup yang kredibel. Pada kasus genosida Rwanda, sejumlah perempuan memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan

¹Avega Agahozo (1999), *Etude sur les violences faites aux femmes au Rwanda*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.truth-out.org pada Oktober 2010.

genosida. Sebagai akibatnya, sejumlah anak terlibat dalam pembunuhan anak dan saudara mereka sendiri. Literatur pada konflik di negara lain menunjukkan bahwa selama dan segera setelah konflik ada penambahan peran perempuan di arena publik hanya diikuti pada tingkat rekonstruksi. Namun demikian, pada kasus Rwanda, partisipasi perempuan dalam ruang publik sebenarnya telah meluas pada sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 1994-2004.²

Dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), Rwanda telah mengambil langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk melawan setiap tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, untuk mengubah dan / atau menghapuskan hukum yang ada, peraturan, kebiasaan dan praktek-praktek yang terdapat diskriminasi terhadap perempuan³.

Perempuan dapat berperan dalam upaya *peacemaker* dan *peacebuilding* secara nyata seperti melakukan banyak tindakan, baik di bidang politik, social maupun ekonomi antara lain terlibat dalam pembicaraan perdamaian (negosiator), membantu rehabilitasi anak-anak korban konflik bersenjata, menjembatani pihak-pihak yang bertikai untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama semisal akses untuk mendapatkan air bersih dan melakukan advokasi agar anggaran

²M. Balikungeri (1999). *Good practices on dealing with gender Based Violence. Rwanda case: Paper presented to the UNIFEM Regional conference on Eliminating of Violence Against Women*. Nairobi, Kenya. Diunduh dari www.wilsoncenter.org pada Oktober 2010.

³*Ibid*

diprioritaskan untuk pelayanan sosial daripada untuk anggaran belanja militer⁴.

Perempuan Rwanda mengambil bagian dalam ranah perpolitikan, pemulihan di tingkat sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya memimpin ketiga dari households di Rwanda, tetapi juga mengambil bagian pada bidang pekerjaan lainnya yang biasa dikerjakan oleh kaum lelaki, seperti konstruksi dan mekanik⁵.

Yang menarik dari peran perempuan dalam proses *peacebuilding* di Rwanda ini yaitu, mereka dapat memobilisasi para perempuan lain di negaranya untuk ikut serta dalam pembangunan dengan mendirikan institusi dan forum perempuan di Rwanda seperti *The Forum of Rwandese Women Leaders Caucus* yang mampu mengadvokasi hak asasi perempuan, kesetaraan gender serta memberikan sumbangan dalam konstitusi. Selain itu, bentuk dari dukungan pemerintah Rwanda yaitu dibentuknya *The Ministry of Gender and Family Promotion*, *The Ministry of Gender and Women in Development* serta *The National Unity and Reconciliation Commission* (NURC)⁶.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perempuan Rwanda telah berdiri sebagai pemimpin teladan di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Keberadaan perempuan di kabinet, parlemen, hukum, dan semua bidang

⁴Joanna Kerr (1999). *Building women's leadership for the 21st century*. New York. Diunduh dari www.journalonline.tk pada Oktober 2010.

⁵Heather B. Hamilton (2000). *Rwanda's Women: The Key to Reconstruction*. Washington DC. Diunduh dari www.muhenberg.edu pada Oktober 2010.

⁶*Ibid*

kehidupan yang bertindak sebagai contoh peran dan juga membantu mengembangkan kepercayaan diantara mereka untuk berperan dalam pembuatan keputusan. Mereka bekerja bersama untuk memeperkuat solidaritas dan persatuan diantara mereka sebagai satu langkah maju mobilisasi perempuan lain. Mereka mendirikan *Unity Club* sebagai forum pemimpin perempuan dan istri para pemimpin pemerintahan yang kemudian bertujuan untuk menciptakan persatuan diantara mereka dan kemudian mampu mengajarkan pesan persatuan dan rekonsiliasi diantara masyarakat⁷.

Pembahasan mengenai peranan perempuan Rwanda dalam bidang politik maupun sosial ekonomi yang didukung oleh pemerintahan dalam kondisi *post-conflict* sangat menarik untuk dikaji. Apalagi meruntut pada kebijakan pemerintah yang sangat mendukung kaum perempuan untuk mengambil andil dalam *Peace-building Development dan Post Conflict Reconstructions*.⁸

B. Latar Blakang Masalah

Peristiwa Genosida di mulai ketika pada tanggal 6 April 1994 Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937-6 April 1994) menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang.

⁷John Mutamba, MBA and Jeanne Izabiliza, MA (2004). *Republic of Rwanda: A Beijing conference ten-year evaluation report*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.find-docs.com pada September 2010.

⁸"*After the genocide, women rolled up their sleeves and began making society work again.*" – Paul Kagame, President of Rwanda dalam pidatonya saat peringatan 10 Tahun pasca Genosida di Kigali, Rwanda.

Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada didalam sebuah helikopter pemberian pemerintah Perancis. Saat itu, habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntaryimira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah Burundi⁹.

Pada tahun 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Habyarimana mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Kekhawatiran sekaligus kekecewaan berlebihan inilah yang akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. Habyarimana akhirnya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentanginya ketika pemimpin itu tengah berada di dalam pesawat (atau helikopter) pemberian Presiden Perancis Francois Mitterand¹⁰.

Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Tanpa menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung

⁹Donald E. Miller and Lorna Touryan Miller (2004). *Orphans of the Rwanda Genocide*. University of Southern California, Los Angeles. Diunduh dari www.ebooklibs.com pada September 2010.

¹⁰*Ibid*

diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi¹¹.

Dampak dari peristiwa genosida sangatlah mengerikan, 800.000 jiwa telah terbunuh yaitu sepersepuluh dari total penduduk Rwanda, jutaan mengungsi, pelayanan infrastruktur sipil hancur, tatanan social bangsa pecah (perempuan menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin suku, menghidupi keluarga)¹².

Perempuan yang selamat dari peristiwa genosida kehilangan suami, anak, kerabat dan masyarakat mereka. Mengalami pemerkosaan sistematis dan penyiksaan, menyaksikan kekejaman yang tak terkatakan, dan kehilangan mata pencaharian dan property mereka. Disamping kekerasan tersebut, perempuan menghadapi perpindahan (*displacement*), *family separation* dan *food insecurity*. Semua hal tersebut menimbulkan post-conflict psychological trauma untuk mereka. Masyarakat Rwanda menyadari bahwa dalam kesakitannya dan perjuangan para perempuan tersebut, maka mereka pantas untuk diberikan peran yang sangat penting dalam pembangunan negaranya¹³.

Peacebuilding di Rwanda sendiri dimulai sejak kembalinya para korban dan pengungsi ke Rwanda sekitar Tahun 1996 yang lebih kurang jumlahnya sekitar 2.000.000 jiwa. Sebelumnya banyak diantara mereka yang mengungsi ke Negara tetangganya seperti Uganda, Burundi,

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³Frank Spalding, *Genocide in Rwanda*, New York, The Rosen Publishing group, 2009, hal. 20

Tanzania dan Zaire. Ada sekitar 300.000 Tutsi yang selamat dari peristiwa genosida, ribuan janda dan banyak diantaranya yang telah diperkosa dan menderita HIV positif, 500.000 anak yatim piatu dan 85.000 diantaranya terpaksa menjadi kepala keluarga¹⁴.

The Government of National Unity yang merupakan pemerintahan transisi pasca Genosida mengatur program awal pembangunan Rwanda. Mereka memulai dengan isu-isu seperti:

- Pemulihan iklim perdamaian dan keamanan
- Memperkuat struktur pemerintahan lokal
- Pemulihan dan konsolidasi persatuan nasional
- Membangun pemukiman pengungsi dan orang-orang terlantar
- Perbaikan dalam kondisi hidup penduduk dan pemecahan perang karena masalah sosial
- Merangsang pertumbuhan ekonomi nasional
- Membangun ulang kebijakan luar negeri negara
- Mempromosikan demokrasi di Rwanda¹⁵

Sebagai tindak lanjut proses *peacebuilding* di Rwanda, Pemerintah Rwanda mengadakan pertemuan konsultatif nasional tokoh penting di Kantor Presiden (*Urugwiro Village*) pada bulan Mei 1998 hingga Maret

¹⁴Lisa Schirch and Manjrika Sewak (2005), *The Role of Women in Peacebuilding*, India. Diunduh dari www.eastviewpress.com pada November 2010.

¹⁵Protails Musoni (2004), *Challenges of Managing Post Genocide Rwanda and How Rwanda Moved From Doomsday Scenario to Rebirth of A Nation*. South Africa. Diunduh dari www.columbia.edu pada Januari 2011.

1999 yang dihadiri seluruh pejabat penting. Selama pertemuan tersebut, permasalahan Rwanda dibahas secara detail dan berbagai kebijakan serta organisasi pemerintahan pun turut direncanakan. Isu utama yang menjadi pusat pemulihan dan rekonstruksi negara dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan adalah persatuan nasional dan rekonsiliasi, mendirikan pemerintahan yang baik, perbaikan sistem keadilan dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah telah menempatkan sejumlah kebijakan dan lembaga yang dimaksudkan untuk memandu jalan negara di masa datang pada pembangunan berkelanjutan¹⁶.

Lebih lanjut, pemerintah mengambil langkah penting dengan menciptakan *The Ministry of Gender and Women in Development* (MIGEPROF) agar dapat mengembangkan tindakan yang akan mengawali kesetaraan dan menghilangkan ketidaksetaraan gender pada proses pembangunan di Rwanda¹⁷.

Keinginan politik ini lebih lanjut dituangkan dalam konstitusi Rwanda yang diumumkan secara resmi pada tahun 2003 pada ayat 9, 10, dan 11 dan khususnya pada ayat 9.4 –

“Pembangunan negara yang diatur oleh peraturan hukum, pemerintah demokratis pluralitas, kesetaraan semua rakyat Rwanda dan antara pria dengan wanita menggambarkan dengan cara memastikan bahwa wanita diberikan paling tidak tiga puluh persen suara dalam organ pembuatan keputusan”

¹⁶John Mutamba, MBA and Jeanne Izabiliza, MA (2004). *Republic of Rwanda: A Beijing conference ten-year evaluation report*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.find-docs.com pada Januari 2011.

¹⁷*Ibid*

Ayat 11 lebih lanjut menyebutkan, "Semua rakyat Rwanda terlahir dan tetap merdeka dan sama dalam hak dan tugas. Diskriminasi dalam bentuk apapun, inter alia, asal etnik, suku, klan, warna, jenis kelamin, daerah, asal sosial, agama atau kepercayaan, pendapat, status ekonomi, budaya, status sosial, cacat fisik maupun mental atau berbagai bentuk diskriminasi lain dilarang dan diatur oleh hukum"¹⁸

Pada periode 1994-1999, patut diketahui bahwa peran penting yang dimainkan oleh perempuan baik secara individu maupun kolektif dalam perkumpulan mereka yaitu mereka menyumbang pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Rwanda dengan cara berpartisipasi pada pembangunan rumah pada awal penempatan yang diadakan secara lokal yang bernama *imidugudu*. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rwanda perempuan mulai melakukan tugas non tradisional seperti pembangunan rumah¹⁹.

Pada awal program rekonstruksi negara, *The Government of National Unity* (GNU) memasukan mekanisme nasional untuk memastikan bahwa perempuan dapat memainkan peran aktif pada proses rekonstruksi paska genosida. Pemerintah mendirikan *Family and Woman's Affair*, tujuan dari komite tersebut adalah untuk menyediakan forum bagi perempuan Rwanda untuk menyalurkan aspirasi dan minat mereka untuk pemulihan negara dan andil dalam proses rekonstruksi²⁰.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Elizabeth Powley (2003), *Strengthening Governance: The role of women in Rwanda's transition, women, waging Peace*. Washington DC. Diunduh dari www.efm.leeds.ac.uk pada Januari 2011.

²⁰John Mutamba, MBA and Jeanne Izabiliza, MA (2004). *Republic of Rwanda: A Beijing conference ten-year evaluation report*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.find-docs.com pada Januari 2011.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan pada peranan perempuan Rwanda dalam bidang politik, sosial dan ekonomi pada proses *peacebuilding* Rwanda. Maka dalam skripsi ini, penulis akan berusaha mengkaji lebih lanjut peranan mereka dalam ke3 bidang tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:

“Peran apa yang dilakukan perempuan Rwanda dalam proses pembangunan perdamaian pasca peristiwa genosida ?”

D. Kerangka Pemikiran

Dalam konsep yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO ditekankan bahwa untuk terwujudnya budaya damai penting untuk tidak hanya semata-mata menfokuskan diri pada pembangunan kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik, tapi juga mencegah timbulnya kekerasan dengan menyebarluaskan suatu budaya di mana relasi-relasi yang konflikktual ditransformasikan ke dalam hubungan-hubungan kerjasama sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran. Damai jangka panjang atau yang biasa disebut damai positif di sini memiliki ciri-ciri mempromosikan keadilan, kepercayaan dan empati, serta menekankan

kerjasama dan dialog. Strategi yang digunakan bukan pemutusan hubungan antara kelompok, melainkan peningkatan hubungan antar kelompok, bukan berasal dari atas, tapi dari bawah²¹.

Dalam sebuah wilayah konflik sosial, utamanya konflik bersenjata (perang), perempuan dan anak-anak selalu berada dalam posisi dan situasi yang paling kurang menguntungkan dibandingkan kaum lelaki. Itulah sebabnya, mereka sering disebut sebagai korban yang dikorbankan (*the victimized victim*)²².

Konsep Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan, yaitu:

- Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.
- Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik

²¹Harsa Arizki (1998), *Memahami konflik dan resolusi konflik*, diunduh dari www.scribid.com pada Oktober 2010.

²²Agus Sriyanto (2002), *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Bandung. Diunduh dari www.scribid.com pada Oktober 2010.

sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.

- Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
- Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng²³.

Resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap, berikut merupakan penjabaran dari proses perdamaian suatu konflik:

1. De-eskalasi Konflik. Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi

²³Andi Widjanto (2001), *Empat Tahap Resolusi Konflik*, Jakarta. Diunduh dari www.tempointeraktif.com pada Oktober 2010.

militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

2. Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik. Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik

3. Problem-solving Approach. Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi

4. Peace-building. Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural²⁴.

Peace-building sesungguhnya mencakup kerja-kerja yang luas baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang, tapi sesuatu keadaan dinamis, partisipatif, dan berjangka -panjang, yang

²⁴*Ibid*

berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis keseharian, yaitu keluarga, sekolah, komunitas dan negara.

Perempuan Dalam Situasi Konflik

Perempuan dalam wilayah konflik berada dalam setidaknya dalam 6 situasi yang terjepit dan sangat kurang menguntungkan mereka, penjabarannya adalah sebagai berikut:

- Pertama, perempuan dilihat sebagai identitas kelompok. Dalam konflik bersenjata perempuan seringkali dijadikan sasaran oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Posisi perempuan dalam konstruksi patriarkal sering dianggap sebagai identitas kelompok, sehingga perempuan rentan menjadi sasaran kekerasan dengan tujuan melemahkan pihak lawan.
- kedua perempuan dalam wilayah konflik adalah sebagai tameng. perempuan diminta menghadapi kelompok garis depan untuk menghadang pihak lawan.
- Ketiga, perempuan menjadi objek kekerasan seksual. Konsentrasi kelompok bersenjata di daerah konflik juga menimbulkan persoalan pengobjekan perempuan secara seksual. Dalam situasi itu, perempuan dan masyarakat tidak mempunyai cukup daya tolak untuk menghentikan pengobjekan ini. Situasi ini juga berdampak buruk pada

status kesehatan perempuan. Mereka rentan tertular PMS, HIV/AIDS dan aborsi yang dipaksakan.

- Keempat, perempuan di wilayah konflik mengalami beban ganda. Dalam situasi ini perempuan harus mengambil alih peran yang biasanya dijalankan laki-laki. perempuan selain harus menanggung beban untuk keluarganya, mereka juga menanggung beban untuk melayani kebutuhan sehari-hari aparat keamanan.
- Kelima, perempuan sebagai pelaku kekerasan. Posisi keenam perempuan di wilayah konflik adalah sebagai pencipta perdamaian (*peacemaker*) Peran perempuan yang sering dilupakan dan diabaikan dalam konflik adalah upaya-upaya mereka untuk menjadi *peacemaker* diantara pihak-pihak yang berkonflik²⁵.

Dari tipologi diatas, kita bisa menyarikan bahwa viktimisasi perempuan dalam wilayah konflik mengambil dua bentuk pokok, yaitu:

- (1) penghancuran fisik, Penghancuran fisik dilakukan lewat, misalnya: perkosaan, penyiksaan, menjadikan tameng, dan memberikan beban kerja yang berlebihan (*overload work*).
- (2) penghancuran mental / psikis, Penghancuran mental / psikis dikenal dengan istilah lain yaitu traumatisasi, di mana perempuan dijadikan objek kekerasan yang, dimulai lewat

²⁵Hilde Jansen (1999), *Perempuan dalam situasi konflik*, diunduh dari www.komnasperempuan.or.id. Pada september 2010

kekerasan fisik, pada gilirannya akan sampai pada kekerasan psikis / mental yang menimbulkan efek traumatis (jera) dan akhirnya tunduk (submisi)

- (3) Penghancuran simbolis, penghancuran simbolis dilakukan dengan tindak merendahkan martabat perempuan di hadapan umum (*public humiliation*), contohnya seperti menyebarkan isu kekerasan yang dikhususkan untuk kaum perempuan serta pelanggaran sistem dan budaya patriarkal yang merendahkan (subordinasi) partisipasi perempuan di ruang publik betapapun status mereka sudah berubah dan mereka merasa “berkewajiban” untuk memikul peran ganda (domestik dan publik) yang merupakan akibat langsung dari relasi & ekspektasi gender yang ditetapkan secara sepihak oleh masyarakat padanya²⁶.

Peranan Perempuan Dalam Resolusi Konflik

General Assembly Resolution dari PBB no 1325 menekankan perlunya penyadaran program akan kebutuhan spesifik dari perempuan, anak perempuan, orang cacat, tua maupun muda terhadap pemahaman dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, serta partisipasi mereka dalam proses-proses perdamaian yang secara

²⁶*Ibid*

signifikan akan memberikan kontribusi atas promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan.

Jaringan Studi Pembangunan tentang pengarusutamaan gender dalam Operasi Pendukung Perdamaian (*Peace Support Operation*) menggarisbawahi pengakuan PBB bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan resolusi konflik amatlah penting untuk mencari solusi konflik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengakuan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam mendukung perdamaian amatlah penting.

Perempuan telah bekerja bersama-sama untuk membangun visi baru tentang perdamaian, yang menaruh perhatian pada masalah-masalah kemanusiaan sebagai fokus perhatian. Para perempuan yang datang dari beragam latar belakang ini seperti pekerja sosial, guru, pemimpin masyarakat dan sebagainya memainkan peran penting dalam pembangunan perdamaian dan proses rekonsiliasi di masyarakat, aktivitas-aktivitas mereka meliputi:

- (1) Membuat inisiatif proses perdamaian melalui rekonsiliasi lintas masyarakat, seperti contohnya mengadakan pertemuan yang berbasis komunitas. Dalam pertemuan ini, para korban, pelaku kejahatan dan masyarakat luas bisa berpartisipasi secara langsung dalam mencari penyelesaian agar pelaku pelanggaran bisa diterima kembali oleh masyarakat;

- (2) Berpartisipasi dalam proses perdamaian di tingkat lokal, nasional, regional dan global, seperti ikut aktif dalam organisasi lokal maupun internasional berbasis gender yang menitikberatkan pada management konflik dan resolusi konflik;
- (3) Terlibat dalam rekonstruksi, demobilisasi, perlucutan senjata, proses integrasi dan program-program pembangunan. Contohnya UNIFEM (*United Nation Development Fund for Woman*) telah aktif dalam mengembangkan kebijakan mengenai senjata api yang digunakan dalam situasi konflik karena dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, pembangunan dan menjalankan pemerintahan negara maupun tradisi-tradisi dalam masyarakat lokal (menggantikan para lelaki yang telah menjadi korban perang), meniadakan militer dan lebih menggunakan *soft power* serta berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di negaranya;
- (4) Keterlibatan dalam lobi dan menunjukkan aktivitas untuk menciptakan perdamaian, perempuan memiliki cara untuk melakukan lobi dan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian, seperti bernegosiasi dengan negara tetangga yang tidak terlibat konflik agar mau memberikan tempat berlindung untuk para pengungsi perang, atau menjaga

- agar tidak terjadi peperangan dengan ikut serta dalam aktifitas negosiasi dan diplomasi antar kelompok yang akan berperang;
- (5) Menciptakan strategi yang menekankan kebutuhan mendasar sehari-hari dan membangun masyarakat, seperti menyediakan makanan, obat-obatan, maupun usaha kewiraan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi para korban perang²⁷.

Berdasarkan konsep diatas, perempuan Rwanda memiliki andil diantaranya dalam Membuat inisiatif proses perdamaian melalui rekonsiliasi lintas masyarakat, seperti contohnya mengadakan pertemuan yang berbasis komunitas, Berpartisipasi dalam proses perdamaian di tingkat lokal, nasional, regional dan global, seperti ikut aktif dalam organisasi lokal maupun internasional berbasis gender yang menitikberatkan pada management konflik dan resolusi konflik, terlibat dalam rekonstruksi, demobilisasi, perlucutan senjata dan program-program pembangunan, keterlibatan dalam lobi dan menunjukkan aktivitas untuk menciptakan perdamaian di tingkat lokal dan menciptakan strategi yang menekankan kebutuhan mendasar sehari-hari.

Pemerintah Rwanda telah memfasilitasi, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab pada perempuan untuk membangun kembali negara dengan menunjuk mereka pada semua posisi kepemimpinan dan tanggung

²⁷Birgitte Sorensen (2000), *Perempuan dan Rekonstruksi pasca konflik: isu dan Sumber*, diunduh dari www.genderandpeacekeeping.com pada September 2010.

jawab di masyarakat. Contohnya, perempuan bertindak sebagai pejabat eksekutif, legislatif dan hukum pemerintahan.

Mereka mampu melobi bersama dan mempengaruhi mengundang hukum yang melindungi dan memudahkan hak asasi wanita. Contohnya, hukum warisan, hukum hak asasi anak dan hak asasi wanita di tempat kerja, dsb.

Perlu diketahui bahwa Presiden dari Pengadilan Tinggi Rwanda adalah perempuan dan menteri hukum maupun sekretaris peradilan Gacaca juga perempuan. Dari 12 hakim di Pengadilan Tinggi, 5 diantaranya perempuan (perwakilan 41,7%). Lebih lanjut, pada tingkat administrasi lokal, perempuan mengisi 26% jabatan dewan eksekutif di tiap provinsi²⁸

Kepemimpinan perempuan juga ditunjukkan dengan cara menyusun struktur organisasi perempuan, yang dikenal dengan sebutan *National Women Council*. Dewan wanita nasional menyediakan platform untuk memungkinkan wanita mendapatkan jarak pandang dan mampu menyumbang pada debat nasional dan mempengaruhi pengembangan kebijakan dan proses demokratik negara itu. Contohnya memobilisasi wanita untuk berperan pada peradilan Gacaca, desentralisasi, proses penanggulangan kemiskinan, melawan wabah HIV/AIDS dan isu-isu lain yang berhubungan dengan genosida tahun 1994²⁹.

Beberapa alasan mendasar mengapa perempuan perlu dilibatkan dalam proses resolusi konflik, diantaranya yaitu:

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

- Pertama adalah karena perempuan memiliki tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia. Di kelompok masyarakat mana pun perempuan memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Peran ini membantu mewujudkan perdamaian, karena perdamaian tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan. Perempuan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan membesarkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perempuan mendidik anak-anak mereka agar berperilaku baik, jujur dan menghargai orang lain. Dalam hal ini perempuan memainkan peran sebagai promotor harmoni dalam masyarakat dan budaya perdamaian. Berkat peran yang dimainkan perempuan sebagai ibu, budaya perdamaian dihayati oleh anak-anak dan menjadi dasar yang penting untuk membangun keluarga dan masyarakat yang penuh kedamaian.
- Kedua, perempuan dapat memainkan peran penting dalam manajemen krisis dan resolusi konflik. Ketika konflik semakin meluas menjadi kekerasan bersenjata, upaya untuk mengundang pihak ketiga untuk membantu resolusi konflik dan menenangkan pihak-pihak yang bertikai menjadi sangat diperlukan. Upaya mediasi semacam itu biasanya dilakukan

oleh perempuan yang dikenal dan dihormati oleh banyak orang.

- Ketiga, perempuan juga memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan perdamaian. Dalam situasi konflik bersenjata, perempuan memainkan peran aktif dalam memulihkan perdamaian, contohnya dalam mencari resolusi konflik akibat pembunuhan seorang anggota kelompok suku. Biasanya seorang perempuan akan diundang sebagai mediator dan dikirim ke keluarga korban. Jika mediasi berhasil dengan baik, maka dua keluarga yang berkonflik akan dapat mencari penyelesaian. Dalam situasi tertentu perempuan dapat mengadakan pertemuan dan memilih gadis tercantik yang siap menikah untuk menjalankan misi perdamaian. Jika misi itu berakhir dengan pernikahan gadis itu dengan salah satu tokoh pihak musuh, maka akan menjadi jalan untuk menengahi konflik tanpa kekerasan³⁰.

Alasan kuat mengapa perempuan di Rwanda harus disertakan dalam *Peace Building* di Rwanda, yaitu karena peristiwa Genosida memberikan dampak yang sangat kuat bagi perempuan Rwanda. Selain itu, perempuan juga memiliki peran yang berpengalaman di bidang *peacemaker*, menjadi ibu rumah tangga, istri dan kakak dimana mereka mampu mendiskusikan suatu masalah secara jujur dan terbuka. Perempuan mahir dalam hal

³⁰*Ibid*

win/win situation, sehingga perempuan sering disertakan dalam penyelesaian konflik (sebuah model keluarga yang mencari keadilan dan rekonsiliasi daripada kemenangan dan retribusi).

E. Asumsi Dasar

Dalam proses perdamaian pasca Genosida, perempuan Rwanda memainkan peranan penting dalam pembangunan dan rekonstruksi negaranya. Peranan tersebut terdapat pada bidang Politik seperti contohnya bernegosiasi serta memberikan partisipasi aktif dalam proses perdamaian di tingkat lokal, nasional dan regional seperti ikut ambil bagian dalam memelihara keamanan. Di bidang Sosial dan Ekonomi seperti contohnya, terlibat dalam rekonstruksi infrastruktur, demobilisasi dan menciptakan strategi yang menekankan kebutuhan mendasar sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan berupa intepetasi logis dengan menggunakan analisis kualitatif. Rumusan masalah disusun secara bertahap. Pada tahap awal sebelum pengumpulan data di kemukakan rumusan masalah yang bersifat luas, yang kemudian setelah data yang bersifat umum dikumpulkan, rumusan masalahnya semakin dipersempit dan lebih difokuskan sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan. Rumusan masalah yang diajukan pada tahap pertama dimaksudkan sebagai panduan dalam mengumpul data, sedangkan rumusan masalah yang

diajukan pada tahap berikutnya dimaksudkan sebagai panduan untuk menyusun teori. Data-data yang di pergunakan diperoleh dengan melalui teknik studi pustaka serta sumber-sumber menunjang lainnya seperti buku, jurnal serta media internet yan telah tersedia apa adanya.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian khususnya di bidang politik, sosial dan ekonomi pasca peristiwa Genosida di Rwanda pada Tahun 1994.

H. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengambil jangkauan waktu sejak akhir masa peristiwa genosida yaitu Tahun 1994 sejak terbentuknya *International Criminal Tribunal for Rwanda* sampai dengan 10 tahun pasca peristiwa Genosida di Rwanda yaitu Tahun 2004 saat *The National Unity and Reconciliation Commission* (NURC) menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam rekonsiliasi dan peacebuilding di Rwanda menunjukkan kemajuan di bidang politik, social dan ekonomi yang signifikan.

I. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I

Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi mengenai bahasan latar belakang terjadinya peristiwa sampai dengan berakhirnya genosida, termasuk bahasan perjuangan dan penderitaan perempuan dan anak-anak Rwanda pada saat peristiwa sampai dengan kondisi pasca Genosida.

BAB III

Berisi tentang bahasan mengenai perananan perempuan Rwanda dalam pembangunan dan rekonstruksi negaranya di bidang politik.

BAB IV

Berisi tentang bahasan mengenai perananan perempuan Rwanda dalam pembangunan dan rekonstruksi negaranya di bidang sosial dan ekonomi.

BAB V

Kesimpulan dari Bab-Bab sebelumnya.

BAB II

GENOSIDA RWANDA 1994 DAN PENDERITAAN PEREMPUAN RWANDA

Bab ini akan mendeskripsikan mengenai latar belakang dan kronologis terjadinya genosida di Rwanda pada tahun 1994, pihak-pihak yang terlibat, penderitaan perempuan pada saat terjadinya genosida, bagaimana perempuan bisa berperan juga sebagai pelaku genosida dan bagaimana proses terjadinya *peacebuilding* di Rwanda.

A. Genosida Rwanda 1994

Kasus pelanggaran HAM (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) ini terjadi di negara Rwanda sejak tanggal 6 April 1994. Kasus ini melibatkan dua kelompok/suku utama di Rwanda yakni suku Tutsi dan Hutu. Menurut dari beberapa sumber mengatakan bahwa dalam kasus *genocide* ini telah menewaskan kurang lebih 800.000 jiwa. Rwanda sendiri adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah¹.

Peristiwa ini di mulai ketika pada tanggal 6 April 1994 Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937-6 April 1994) menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada didalam sebuah

¹Women for Women, *Rwanda*, dalam www.womenforwomen.org. Diunduh pada februari 2011

helikopter pemberian pemerintah Perancis. Saat itu, habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntaryimira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah Burundi. Sebagian sumber menyebutkan pesawat yang digunakan bukanlah helikopter melainkan pesawat jenis jet kecil *Dassault Falcon*².

Peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk Rwanda. Habyarimana berencana melakukan persatuan etnis di Rwanda dan melakukan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya, seperti tertuang dalam Piagam Arusha (*Arusha Accord*) pada tahun 1993. Untuk diketahui, Habyarimana menjadi presiden Rwanda sejak tahun 1993. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan Rwanda. Pada tahun 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%)³.

Habyarimana mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Kekhawatiran sekaligus kekecewaan berlebihan inilah yang akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap

²Mahmood Mamdani (2001), *when Victims become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda*, India. Diunduh dari www.usu.ac.id pada Februari 2011.

³Ibid

presiden sendiri. Habyarimana akhirnya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentanginya ketika pemimpin itu tengah berada di dalam pesawat (atau helikopter) pemberian Presiden Perancis Francois Mitterand⁴.

Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Tanpa menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi⁵.

B. Kronologis Kejadian Genosida 1994

Pada tanggal 7 April 1994 pemblokiran jalan dibuat oleh Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) dan Interahamwe. Anggotanya dan organisasi Kekuasaan Hutu memulai kampanye pintu ke pintu, dimulai di utara negara dan menyebar ke selatan, menargetkan Rwanda Tutsi juga Hutu moderat. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana, bersama dengan ribuan orang lainnya dibunuh. Mereka bekerjasama dengan kelompok militan Rwanda, *Interahamwe* dan *Impuzamugambi*. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang

⁴Peace Pledge Union (PPU), *Genocide Rwanda: the story*, diunduh dari www.ppu.org.uk pada February 2011

⁵ Elisabeth J. Porter, *Peacebuilding: women in international perspective*, New York, Routledge, 2007, hal. 112

mendukung piagam Arusha⁶ tanpa mempedulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi piagam Arusha⁷.

Pada Tanggal 8 April 1994 Front Patriotik Rwanda, dipimpin oleh calon presiden Rwanda Paul Kagame, melancarkan pertahanan besar untuk mengakhiri genosida dan menyelamatkan tentara yang terperangkap di Kigali. Jumlahnya sangat banyak, mereka mengikuti strategi menyerang pertahanan pemerintah tapi mengizinkan pemunduran, mencegah perang habis-habisan⁸.

Pada Tanggal 15 April-16 April 1994, Pembantaian Nyarubuye adalah nama yang diberikan pada pembunuhan 5000 - 10000 warga sipil di Gereja Katolik Roma Nyarubuye di Provinsi Kibungo, sekitar 140 km (60 mil) timur ibukota Rwanda, Kigali. Korbannya adalah Tutsi dan Hutu moderat yang telah mengungsi di gereja itu. Pria, wanita dan anak-anak dilaporkan dibunuh secara kejam, dengan pelaku menggunakan tombak, machet, club, granat tangan dan senjata otomatis.

⁶Piagam Arusha disahkan pada Tahun 1993 oleh Presiden Habriyimana di Tanzania, isinya mengenai penyatuan etnis Hutu, Tutsi, Twa di Rwanda dan pembagian kekuasaan terhadap etnis-etnis tersebut.

⁷Rene Lemarchand (2000), *Rwanda and Burundi*, New York. Diunduh dari www.lpmjournal.com pada Februari 2011.

⁸Ibid

Pada Tanggal 17 Mei 1994 PBB setuju mengirim 6.800 polisi, untuk menjaga warga sipil, namun hal itu tidak berpengaruh karena sementara itu pembunuhan Tutsi berlanjut.

Pada Tanggal pada 4 Juli 1994 Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF, sekitar 300 mayat masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye berjarak 100 km dari timur Kigali. Korban yang jatuh di etnis lain (twa dan hutu) tidak diketahui, akan tetapi kemungkinan besar ada walaupun tidak banyak jumlahnya.

Sebagian besar korban diletakkan begitu saja dan tidak dimakamkan secara layak. Paling umum saat itu hanyalah ditimbun dengan tanah sekedarnya. Pegunungan Gisozi disinyalir menjadi tempat pemakaman massal. Di tempat ini diperkirakan terdapat 250.000 jasad warga tak berdosa korban konspirasi keji. Dikatakan konspirasi, karena kemudian berkembang cerita bahwa kudeta ini dilakukan pemimpin Front Patriotik Rwanda, RPF (*Rwandan Patriotic Front*) yaitu Paul Kagame. Usai pembunuhan massal, Kagame tampil sebagai Presiden menggantikan Habyarimana. Dalam seratus hari pembantaian berbagai kalangan mencatat tidak kurang dari 800.000 jiwa atau paling banyak sekitar satu juta jiwa etnis Tutsi dan moderat hutu menjadi korban pembantaian.

Memasuki akhir Juli 1994 pemerintahan Hutu mengungsi ke Zaire, RPF menduduki Kigali. Karena begitu banyaknya korban yang bergelimpangan maka timbullah penyakit kolera, Epidemik kolera di Zaire menewaskan ribuan pengungsi Hutu.

Pada 8 November 1994, berdasarkan resolusi PBB no. 955, dibuatlah suatu pengadilan kejahatan perang untuk kasus genosida Rwanda, yang kemudian dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for Rwanda*⁹.

Gambaran menyedihkan keadaan negara tahun 1994 ini secara hidup ditekankan pada pidato oleh Presiden Paul Kagame di Commonwealth Club, San Francisco pada tanggal 7 Maret 2003:

*“Most survivors of the genocide in Rwanda had not one but two brushes with death and most saw first-degree relatives killed and many sustained dreadful wounds themselves. When the government of National Unity took over in 1994, Rwanda was in utter anarchy. There was total displacement of the population. Over 3 million people has sought refuge in neighbouring countries, and many more were internally displaced. There were countless numbers of orphans, widows and widowers, thousands of handicapped people and generally a very vulnerable population. A cloud of insecurity loomed over Rwanda, as the former soldiers and the militia reorganized themselves, intent on continuing their genocidal campaign with the support of the Zaire. Law and order had completely broken down. Large-scale atrocities were still going on in parts of the country. All nation law enforcement agencies and judicial institutions had ceased to exist and the system of administration of justice had come to a complete standstill. Social and economic infrastructures was in a state collapse. Neither school nor hospitals were functioning. The civil service had been decimated or its membership had fled into exile. Genocide and its aftermath in our country demand an understanding of the context as well as the fact that have shaped our society in a long history that spans centuries.”*¹⁰

⁹Organization of African Unity (OAU), *International Panel of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events: Special*, New York. Diunduh dari www.opensubtitles.org pada Februari 2011

¹⁰John Mutamba and Jeanne Izabiliza (2004), *Republic of Rwanda: A Beijing conference ten-year evaluation report*, Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.find-docs.com pada September 2010.

Maka, berdasarkan pidato presiden Kaul Kagame tersebut, jelas bahwa genosida 1994 telah merusak tatanan sosial, ekonomi maupun politik di Rwanda. Dibidang-bidang inilah dimana proses pembangunan perdamaian dan rekonstruksi Rwanda seharusnya dimulai.

C. Pihak- Pihak Yang Terlibat dalam Peristiwa Genosida

Selama peristiwa genosida 1994 di Rwanda, terdapat pihak-pihak yang berperan dalam peristiwa tersebut. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. *Interahamwe* (Bahasa Kinyarwanda berarti "orang-orang yang berdiri bersama" atau "orang-orang yang bekerja bersama" atau "orang-orang yang berjuang bersama"). Interahamwe adalah sebuah organisasi militer Hutu. Kelompok pemberontak ini sering diklaim dalam media Barat banyak melakukan pembunuhan, namun berdasarkan pemantauan dilapangan menuduh Impuzamugambi.

Robert Kajuga adalah Presiden Interahamwe. Wakil Presiden Interahamwe adalah Georges Rutaganda. Interahamwe dibentuk oleh kelompok pemuda lelaki Hutu yang melakukan Genosida Rwanda terhadap suku Tutsi tahun 1994. Interahamwe membentuk Sistem Radio Genosidal yang digunakan untuk memberitahukan dimana Tutsi bersembunyi. Setelah penyerangan ibukota Rwanda, Kigali oleh Front Patriot Rwanda Tutsi (RPF), banyak warga sipil Rwanda dan anggota Interahamwe dievakuasi ke negara sekitarnya, khususnya Zaire, sekarang

Republik Demokratik Kongo dan Tanzania. Sangat mungkin untuk membawa Interahamwe ke pengadilan karena tidak memakai seragam atau memiliki kelompok tergabung atau pengikut. Mereka adalah warga, teman dan pekerja Tutsi. Selama perang, anggota Interahamwe pindah ke kamp pengungsi dan dipindahkan secara internal. Di sana, korban dicampur dengan musuh dan hingga tidak dapat dibuktikan siapa yang membunuh.

Selama perang, ratusan ribu pengungsi Hutu Rwanda dibawa ke Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo), bersama dengan anggota Interahamwe lainnya, Penjaga Presiden, dan RGF, secara keseluruhan disebut *Rassemblement Démocratique pour le Rwanda* (secara kasar, Pengungsi Demokratik Rwanda). Setelah pengumpulan sejumlah Hutu Kongo organisasi ini menggunakan nama *Armée de Libération du Rwanda* (ALiR).

2. *Impuzamugambi* (terkadang Impuza Mugambi, 'mp' diucapkan 'mh'), yang berarti "orang-orang yang memiliki tujuan yang sama" atau "orang-orang yang memiliki satu tujuan" dalam bahasa Kinyarwanda, adalah sebuah milisi Hutu di Rwanda yang dibentuk tahun 1992. Bersama dengan milisi Interahamwe, yang dibentuk sebelumnya dan memiliki banyak anggota, Impuzamugambi bertanggungjawab atas kematian Tutsi dan Hutu moderat selama Genosida Rwanda tahun 1994. Sementara Interahamwe dipimpin oleh orang penting dari partai berkuasa *Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement* (MRND), Impuzamugambi diatur oleh kepemimpinan *Coalition pour la Défense de*

la République (CDR) dan merekrut anggotanya dari sayap pemuda CDR. CDR adalah partai Hutu terpisah yang bekerjasama dengan MNRD, meskipun lebih ekstrim Pro-Hutu dan Anti-Tutsi daripada MRND. Impuzamugambi lebih sedikit anggotanya dari Interahamwe, tapi terdapat dugaan bahwa anggotanya lebih kejam selama genosida. Seperti Interahamwe, Impuzamugambi juga dilatih dan dipersenjatai oleh Pasukan Pemerintah Rwanda (RGF) dan Penjaga Presiden Rwanda dan pemimpin MRND Juvénal Habyarimana. Ketika genosida dimulai April 1994, Interahamwe dan Impuzamugambi beraksi bersama dan menggabungkan struktur dan aktivitasnya, meskipun beberapa perbedaan masih terlihat dari seragamnya. Beberapa génocidaires ikut dengan kedua milisi dalam pembantaian Tutsi dan Hutu moderat. Setelah periode utama genosida, anggota dari kedua milisi juga sebagian besar penduduk Hutu keluar Rwanda ke timur Republik Demokratik Kongo.

Dalam pimpinan CDR, Hassan Ngeze dan Jean-Bosco Barayagwiza bertanggungjawab atas kepemimpinan Impuzamugambi. Keduanya dinyatakan bersalah tahun 2003 oleh International Criminal Tribunal for Rwanda atas merencanakan dan memimpin genosida, pelaksanaan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya diancam penjara seumur hidup. Hukuman terhadap Barayagwiza dikurangi hingga 35 tahun karena kesalahan selama proses. Setelah masa kurungan ditetapkan, ia akan menetap di penjara selama 27 tahun.

3. Suku Hutu. Suku Hutu adalah sebuah nama dari tiga kelompok etnis yang mendiami Burundi dan Rwanda. Hutu merupakan yang terbesar, 85% dari penduduk Rwanda dan Burundi adalah Hutu. Secara budaya, grup ini hanya pembagian buatan, berdasarkan pada kelas sosial dari pada etnisitas, karena tidak ada perbedaan bahasa atau budaya antara Hutu dan kelompok etnis lainnya di wilayah tersebut, terutama Tutsi. Secara sejarah ada beberapa perbedaan fisik, terutama dalam ketinggian rata-rata dan penampilan fisik.

Hutu dan Tutsi memiliki agama dan bahasa yang sama. Beberapa pelajar juga menunjuk pentingnya peran penjajah Belgia dalam menciptakan ide dari ras Hutu dan Tutsi. Orang Hutu tiba di Danau Besar sekitar abad ke-1, menggantikan suku Twa. Hutu mendominasi wilayah ini dengan beberapa kerajaan kecil sampai abad ke-15. Pada waktu itu, dipercayai datanglah Tutsi dari Ethiopia dan menaklukan Hutu. Kerajaan Tutsi hidup sampai akhir jaman kolonial pada 1950-an, penguasa Belgia menggunakan pembagian etnis untuk mendukung pemerintahannya. Kerajaan Tutsi kemudian jatuh dan wilayah tersebut dibagi menjadi Rwanda dan Burundi pada 1962. Tutsi tetap mendominasi di Burundi, sementara Hutu mendapatkan dominasi di Rwanda sampai 1994.

4. Suku Tutsi. Suku Tutsi adalah salah satu dari tiga suku pribumi yang mendiami Rwanda dan Burundi di Afrika Tengah; dua suku lainnya adalah Twa dan Hutu. Suku Twa (atau Batwa) adalah kaum pigmi dan merupakan penduduk asli. Hutu (atau Bahutu) adalah orang-orang yang berasal dari

Bantu dan mendominasi kaum Twa sejak kepindahan mereka. Pada genosida Rwanda pada tahun 1994, banyak penduduk dari ketiga suku ini yang terbunuh.

5. PBB. Beberapa sumber menyebutkan bahwa PBB memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Rwanda. Sebenarnya pertikaian antar suku yang terjadi di Rwanda sudah lama terjadi, sudah di mulai sekitar tahun 1959. Mengenai adanya serangan terorganisir oleh elemen-elemen suku hutu terhadap tutsi sebenarnya sudah tercium dan bahkan sudah sampai ke meja sekjen PBB kala itu(Kofi annan), namun tetap PBB tidak melakukan intervensi, bahkan setelah terjadi genosida itu PBB blum berbuat apa-apa walau Rwanda sudah meminta bantuan kepada PBB.

6. RPF atau Front Patriotik Rwanda. RPF adalah kelompok milisi yang di ketuai oleh Paul Kagame. Yang kemudian menjadi Presiden Rwanda. RPF ada pasukan milisi nasional yang pada lain pihak mendukung dan menjaga serta mencegah terjadinya perang bersaudara ini namun di lain pihak mereka juga melakukan pembunuhan terhadap etnis tutsi¹¹.

D. Penderitaan Perempuan Pasca Genosida 1994

Agathe Uwilingiyimana, merupakan perdana menteri perempuan pertama yang diangkat pada bulan Juli 1993. Dia Dianggap sebagai pihak

¹¹Donald E. Miller and Lorna Touryan Miller (2004), *Orphans of the Rwanda Genocide*, University of Southern California, Los Angeles. Diunduh dari www.ebooklib.com pada September 2010.

politik Hutu moderat dan terkenal karena usahanya untuk menyatukan masyarakat Rwanda dan menolak semua bentuk rasisme dan etnisme.

Pada saat dimulainya genosida, Uwilingiyimana berada dalam perlindungan pasukan Belgia, ia merupakan buruan tentara interahamwe, ekstrimis Hutu. Dalam masa pengejarannya, PBB telah memberitahunya bahwa otoritas mereka di Rwanda telah di tolak oleh militer Rwanda, sehingga mereka tidak dapat melindunginya lagi¹².

Menjelang tengah hari pada 7 April 1994, tentara musuh telah menemukan persembunyian Uwilingiyimana. Pada saat itulah dia menyerahkan diri, demi keselamatan suami dan kedua anaknya. Dengan menyerahnya Uwilingiyimana, maka, dengan serta merta tentara interahamwe menembaknya. Saksi yang menemukan jenazahnya menyatakan bahwa kondisi jenazah Uwilingiyimana sangat mengenaskan, dengan pakaian setengah terbuka dan terdapat botol bir didalam kemaluannya¹³.

Propaganda media nasional, merupakan kunci keberhasilan genosida di Rwanda. Ekstrimis hutu menggunakan media Radio untuk mempropaganda etnis Tutsi.

The “Hutu Ten Commandments” adalah pesan propaganda yang sangat populer dan telah di distribusikan dengan sangat luas. Tiga dari kesepuluh komandemen yang paling terkenal untuk membunuh karakter

¹²Alison des Forges (1999), *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*, New York. Diunduh dari www.clgf.org.uk pada januari 2011.

¹³*Ibid*

perempuan Tutsi adalah:

1. Setiap orang Hutu harus mengetahui bahwa perempuan Tutsi, tidak peduli siapapun, bahwa mereka bekerja bersama dalam solidaritas etnis Tutsi lainnya. Karena itu, setiap orang Hutu akan disebut sebagai penghianat apabila menikahi perempuan Tutsi, memiliki selir perempuan Tutsi memiliki sekretaris maupun anak didik dari suku Tutsi.
2. Setiap orang Hutu harus mengetahui bahwa anak perempuan hutu kita jauh lebih bermatabat dan lebih teliti dalam peran mereka sebagai perempuan, istri dan ibu dibandingkan perempuan Tutsi. Dan perempuan Hutu jauh lebih cantik dan dapat menjadi sekretaris yang baik dan jujur.
3. Setiap perempuan Hutu, diwajibkan memiliki kewaspadaan terhadap keberadaan perempuan tutsi, mereka diharuskan untuk menjaga suami dan anak-anak mereka dari perempuan Tutsi apapun alasannya.¹⁴

Kampanye propaganda tersebut jelas sangat membantu dalam menciptakan situasi yang sangat memojokkan keberadaan perempuan Tutsi. Mereka benar-benar diperlakukan tidak manusiawi pada masa itu. Mereka dilabelkan dengan symbol kejahatan dan kenistaan yang pernah ada di Rwanda, semua ini dilakukan untuk '*ethnically cleans*' suku Tutsi.

¹⁴Alison des Forges (1995), *The Ideology of Genocide Issue: A Journal of Opinion*, Washington DC. Diunduh dari www.webster.edu pada Februari 2011

Salah satu wawancara dengan perempuan korban genosida yang selamat dari kejaran ekstrimis Hutu adalah Adria Mukamugema, ia berhasil selamat setelah suami dan keempat anaknya dibunuh oleh Interahamwe didepan matanya.

“The morning of 7th April my life changed. Early in the morning people came to our home and they ordered us to go out and started looting our property. We ran and hid in a banana plantation. At 2pm a group of Interahamwe found us, they killed my four children and husband in front of me and left me behind to die of grief. I watched as they turned and cried in pain, bleeding from machete wounds. I tore pieces of cloth to stop bleeding in vain. I ran to a neighbour's house to seek help, but was turned down because they said that if they help me they would be killed. I didn't get help for them. I really tried but people were just laughing at me. I went mad, and asked people to kill me and stop my grief. I wish they had saved me from the kind of grief I now bear.”¹⁵

Diperkirakan sekitar 60-70% penduduk Rwanda hanya terdiri dari perempuan, dimana 50% nya adalah janda korban Genosida¹⁶. Perempuan dan anak-anak perempuan tidak hanya menyaksikan pembunuhan orang tua, saudara maupun teman-teman dan penghancuran rumah tempat tinggal mereka di depan mata, namun mereka juga menyaksikan dan merasakan sebagai korban penyiksaan dan perkosaan oleh Tentara Interahamwe secara berulang-ulang dan beramai-ramai. Gambar dibawah ini menceritakan betapa kejamnya kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada saat genosida terjadi:

¹⁵Survivors-Fund Organization, *Testimonies from Widows*, diunduh dari www.survivors-fund.org.uk diakses pada februari 2011.

¹⁶The Avega-Agahozo Foundation Association of Genocide Widows, *Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.avega.org.rw pada Januari 2011.

Gambar 2.1

Korban genosida yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak suku Tutsi dibiarkan begitu saja dijalanan.



Sumber: www.history1900s.about.com. Diakses pada Februari 2011

Seorang *survivor* genosida yang selamat dan kini telah memulai kehidupan yang baru bernama Angelique Kairangwa mengungkapkan kisahnya,

“They took my husband and killed him. I was 8 months pregnant. Then another group came and took both my parents and my husband's family and killed them. I was then raped and left bleeding. I thought I would lose my baby, luckily I didn't.”¹⁷

Tujuan mereka memperkosa perempuan tutsi adalah untuk membebaskan mereka dari etnis Tutsi yang dibawanya sejak lahir. PBB memperkirakan bahwa antara 250.000-500.000 perkosaan itu dilakukan selama genosida¹⁸. Tekanan yang dihadapi perempuan Tutsi sangatlah mengerikan, sebelum mereka diperkosa, mereka dipaksa menyaksikan pembunuhan orang yang mereka cintai. Selain itu, dalam penyiksaannya, mereka diperkosa dengan memasukkan benda tajam kedalam kemaluan

¹⁷Gendecide Organization, *the Survivor's story*, Rwanda. Diunduh dari www.gendecide.org pada February 2011.

¹⁸“Rwandan Women Surviving Genocide now Face AIDS”, *Rwanda*. Diunduh dari www.afrol.com pada Desember 2010.

mereka maupun memasukkan sejenis cairan kimia berupa asam agar mereka tidak dapat memiliki keturunan dimasa depan. Selain itu, para lelaki yang terkena HIV sengaja ditularkan kepada perempuan Tutsi yang masih sehat.

Perkosaan jelas digunakan sebagai alat perang pada genosida di Rwanda. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hati, jiwa dan raga perempuan Tutsi serta untuk mengisolasi mereka dari keluarga dan masyarakat etnis Tutsi mereka. Banyak perempuan yang secara jelas mengetahui siapa pemerkosa mereka, namun mereka tak memiliki daya apapun untuk membalasnya. Namun di Rwanda, pasca Genosida 1994, perempuan sebagai korban perkosaan kadang salah diartikan oleh masyarakat. Mereka dianggap bekerjasama dengan pembunuh karena mau melayani nafsu mereka. Namun kenyataannya, mereka juga hanyalah korban kejahatan genosida¹⁹.

Perempuan Tutsi dijadikan target sebagai korban dan musuh yang harus dihancurkan dalam rangka melestarikan suku Hutu. Menurut ideologi ekstrimis Hutu, perempuan Tutsi berusaha memanipulasi orang Hutu sebagai sarana untuk mencapai dominasi di Rwanda. Dari latar belakang itulah maka suku hutu melakukan kekerasan seksual maupun penyiksaan terhadap suku tutsi, hal tersebut dianggap sebagai metode yang sangat efektif untuk mempermalukan dan mengontrol populasi suku

¹⁹Organization of African Unity (OAU), *International Panel of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events: Special Report*, New York. Diunduh dari www.law.duke.edu pada Januari 2011.

Tutsi²⁰.

Anak-anak juga mendapatkan kesulitan yang sangat ekstrim, banyak dari mereka yang kehilangan orang tua selama Genosida 1994. UNICEF memperkirakan 95.000 anak telah menjadi yatim piatu. Selain itu, banyak anak-anak yang telah lahir dari korban perkosaan yang ditelantarkan, ditolak maupun ditinggalkan. Ribuan anak terpisah dari orang tua mereka saat kembali dari kamp pengungsian ke Rwanda setelah Genosida²¹.

Menurut UNICEF, anak-anak yatim tersebut sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak anak yang tidak terlindungi dan sering tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan makanan maupun uang untuk kelangsungan hidup mereka. Pada tahun 1995 Pemerintah Rwanda memformalkan kebijakan resmi yang berurusan dengan isu anak yatim korban Genosida. Kebijakan tersebut berisi mengenai kepengurusan dan keberadaan anak yatim tersebut. Mereka diangkat menjadi anak tiri dan sisanya akan dikirim ke lembaga pengasuhan. Ribuan anak-anak ditempatkan ke panti asuhan agar kehidupan dan kesehatan mereka dapat terjamin. Sangat sulit untuk menelusuri keluarga mereka, karena umur mereka yang masih sangat muda menyulitkan mereka untuk mengingat

²⁰Human Rights Watch, *Rwanda: Struggling to Survive*, New York. Diunduh dari www.hrw.org pada January 2011.

²¹Human Rights Watch, *Lasting Wounds: Consequences of Genocide and War on Rwanda's Childre*, New York. Diunduh dari www.hrw.org pada January 2011.

dari mana asal mereka²².

Rumah Tangga di Rwanda sangat ingin merawat banyak anak yatim piatu tersebut, karena mereka tergiur dengan uang tunjangan yang diberikan pemerintah dan LSM untuk keluarga yang mengangkat anak. Namun, ternyata anak-anak yatim tersebut malah digunakan sebagai pekerja rumah tangga dan tenaga kerja domestik. Penempatan anak-anak yatim dalam keluarga yang mengangkat anak tersebut dirasa kurang efektif, mengingat banyaknya tugas yang diemban oleh LSM. Hal ini sangat tidak disukai anak-anak yatim, tersebut, sehingga mereka lebih menyukai kehidupan bebas di jalanan.

E. Proses Peace Building

Dalam periode sepuluh Tahun sejak pasca peristiwa Genosida, yaitu Tahun 1994-2004, perempuan Rwanda telah menunjukkan peranannya yang signifikan dibidang Politik, Ekonomi dan Sosial dengan dukungan dari pemerintah. Tujuan dari keterlibatan mereka yaitu untuk membangun kembali negaranya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Bab-Bab selanjutnya.

Pasca Genosida, terbentuklah Pemerintahan Reuni Nasional (*The Government of National Unity*) yang merupakan pemerintahan transisi pasca Genosida. Pemerintahan ini dipimpin oleh President Pasteur Bizimungu dengan wakil presiden Paul Kagame dengan 7 partai politik

²²UNICEF, *Rwanda: Facts and Figures*, New York. Diunduh dari www.unicef.org pada Februari 2011.

yang terlibat didalamnya mereka adalah *Front Patriotique Rwandais* (FPR), *Parti Social Démocrate* (PSD), *Parti Libéral* (PL), *Parti Démocrate Centriste* (PDC) *Parti Démocratique Idéal* (PDI), *Parti Socialiste Rwandais* (PSR) dan *Union Démocratique du Peuple Rwandais* (UDPR).²³

Mereka mulai bekerja dengan menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (*good Governance*), peningkatan keamanan nasional (*National Security*), memulai kegiatan rekonsiliasi dan persatuan (*Unity and Reconciliations*), membangun pengadilan untuk pelaku genosida, *democratization*, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan pendidikan.

Sebagai langkah awal program peacebuilding di Rwanda, *The Unity and Reconciliation Commission* yang merupakan komisi untuk masalah persatuan dan rekonsiliasi yang ada dalam pemerintah transisi memulai usahanya dengan melakukan seminar, dengar pendapat dan kursus yang diadakan diseluruh negeri untuk memupuk cita-cita, membangun kembali kepercayaan diri dan rasa saling percaya didalam diri masyarakat²⁴. Dalam kegiatan awal pemerintahan transisi, perempuan memulai peran aktifnya dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Perempuan Rwanda yang mulai bangkit dari keterpurukan dapat memobilisasi perempuan lainnya untuk segera bangkit dari kesedihan

²³“The Government of the Republic Rwanda”, diunduh dari www.safariafrica.com pada februari 2011.

²⁴Jurist Law, *Constitution, Government & Legislation in Rwanda*, diunduh dari www.jurist.law.pitt.edu pada februari 2011

mereka. Mereka mulai membangun kepercayaan dan saling bekerjasama dalam menghidupi anak-anak yatim, orang-orang tua dan orang-orang cacat, untuk lebih jelasnya akan lebih detil diceritakan dalam Bab selanjutnya.

Untuk memperbaiki sistim politik di Rwanda, pemerintah menggunakan sistem pemilihan suara. Dimana semua pihak yang ada di Negara ini dilibatkan, mulai dari lelaki, perempuan, anak-anak muda maupun orang-orang cacat. Berthe Mukamusoni, terpilih menjadi salah satu anggota perlemen periode transisi, ia menjelaskan bahwa;

In the history of our country and society, women could not go in public with men. Where men were, women were not supposed to talk, to show their needs. Men were to talk and think for them. So with [the women's councils], it has been a mobilization tool, it has mobilized them, it has educated [women] ... It has brought them to some [level of] self-confidence, such that when the general elections are approaching, it becomes a topic in the women's [councils]. 'Women as citizens, you are supposed to stand, to campaign, give candidates, support other women.' They have acquired a confidence of leadership.²⁵

Kesuksesan perempuan dalam dunia politik di Rwanda dapat mendorong perempuan lain untuk mulai bekerja sebagai pemimpin maupun tulang punggung di keluarganya.

Perempuan juga memulai andil nya dalam memajukan perekonomian bangsa, mereka membuat perkumpulan perempuan dari berbagai latar belakang dan melatih diri untuk memiliki skill agar dapat

²⁵Peace Uwineza and Elizabeth Pearson (2009), *Sustaining Women's Gains in Rwanda: The Influence of Indigenous Culture and Post-Genocide Politics*. Kigali. Diunduh dari www.internationalpeaceandconflict.org pada februari 2011.

menghasilkan pemasukan keuangan mereka, seperti dalam contoh gambar berikut:

Gambar 2.2

Perempuan Rwanda bersama-sama membudidayakan tanaman kentang sebagai makanan sehari-hari maupun untuk dijual ke pasar-pasar tradisional.



Sumber: www.rwandawomennetwork.org. Diakses pada Februari 2011

Pembangunan tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya keadilan dan kemanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Rwanda, untuk menindak para pelaku genosida 1994, pemerintah transisi memberlakukan sistem pengadilan tradisional yang dikenal dengan nama Gacaca. Pengadilan ini berfungsi untuk menghukum orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan perang dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Pengadilan ini tersebar di seluruh provinsi Rwanda, dan mengadili orang-orang yang bersalah tanpa kecuali. Pengadilan ini bersifat terbuka dan sebagian besar juri dan pengurus Gacaca adalah perempuan, seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.3

Gambar sebelah kiri diatas menunjukkan prosesi pengadilan dan gambar sebelah kanan adalah juri pengadilan yang sebagian besar dijabat oleh kaum perempuan.



Sumber: www.inkoko-gacaca.gov.rw. Diakses pada Februari 2011.

Proses pembangunan perdamaian di Rwanda memang tidak pernah lepas dari campur tangan perempuan, dan terbukti mereka mampu membuktikan diri kepada dunia bahwa mereka mampu dan pantas untuk dihargai atas kinerja mereka.

BAB III

PERANAN PEREMPUAN RWANDA DALAM BIDANG POLITIK

Dalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai peranan perempuan dalam bidang politik yang meliputi dukungan pemerintah dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, peranan mereka dan beberapa organisasi berbasis perempuan yang ada di Rwanda.

A. Dukungan Pemerintah Rwanda Terhadap Partisipasi Perempuan

Rwanda adalah pemimpin besar dalam mengembangkan kesetaraan gender. Pada lebih dari satu dekade reformasi dalam bidang politik dan arena legislatif telah menempatkan pemberdayaan perempuan pada garis depan prioritas pemerintah dan memberikan perempuan di Rwanda hak yang meyakinkan. Pada kejadian setelah genosida, mereka terlihat sebagai kunci untuk pemilihan dan pembangunan Negara.

Genosida Rwanda yang terjadi pada Tahun 1994 telah memaksa banyak orang menjadi pengungsi di negara tetangga dan lebih dari sejuta orang menghilang selama kurang dari lima hari. Sebagai akibat dari genosida, infrastruktur negara rusak total, 4.000 hingga 5.000 anak menjadi yatim piatu dan 200.000 wanita menjadi janda. Kejahatan tersebut

merupakan kejahatan yang dilakukan rakyat Rwanda kepada rakyat Rwanda itu sendiri¹.

Pasca genosida 1994, perubahan pada matrimonial, warisan, dan hukum tanah telah menjadi hak untuk perempuan sejak terciptanya pemerintahan sementara pasca genosida, sebelumnya perempuan hanya dianggap sebagai hiasan dan buruh dalam kehidupan mereka.

Tidak seperti di banyak negara tetangga, hukum baru mengesampingkan hukum adat yang seringkali diabaikan hak asasi milik perempuan. Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang dapat dijadikan contoh pada semua tingkat pemerintah: 49 persen pada majelis rendah parlemen, 30 persen di senat, 44 persen di Pengadilan Tinggi; dan 40 persen provinsi diatur oleh perempuan². Perubahan ini terjadi pasca peristiwa genosida 1994 di Rwanda.

Pada periode transisi selama 1994-2003, keterwakilan perempuan dalam parlemen mencapai 25, 7³. Pemilihan parlemen yang dilaksanakan pada September 2003 menandakan bahwa periode transisi pasca genosida telah berakhir, dimana telah memberikan RPF masa kejayaan. Dengan perempuan mendapatkan 49% kursi di *lower house* dan 30% kursi di

¹Women for women, *Rwanda*, dalam www.womenforwomen.org. Diunduh pada februari 2011.

²Government of Rwanda and FIAS, *Sources of Informal Activity in Rwanda*, Washington, DC. Diunduh dari www.africom.mil pada februari 2011.

³Elisabeth Powley (2003), *Rwanda: Women Hold Up Half the Parliament*, New York. Diunduh dari www.mail-archive.com pada Februari 2011.

upper house, telah menjadikan total hampir 50% total keterwakilan mereka di lembaga pemerintahan⁴.

Pada bulan Juli 1994, pemerintahan reuni nasional telah dibentuk dengan 22 menteri didalamnya, dan diantaranya terdapat dua menteri perempuan. Perempuan Rwanda yang melarikan diri dari peristiwa genosida dan telah kembali ke Rwanda itulah yang menjadi perempuan pertama yang terlibat dalam rekonstruksi negaranya mereka kemudian memobilisasi sejumlah perempuan lain untuk mulai memutuskan terlibat dalam kancah perpolitikan. Mereka memutuskan keinginannya untuk berpartisipasi dan membangun perdamaian jangka panjang⁵.

Selama periode Sepuluh tahun pasca peristiwa genosida di Rwanda pada 1994-2004, keterwakilan perempuan di pemerintahan mencapai 25,7%⁶. Rwanda memiliki sistem *Bicameral Legislative*, dimana *The Upper House* disebut *Senate*, dan *The Lower House* disebut *Chamber of Deputies*. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Rwanda, perempuan diberikan jatah 30% dalam pemerintahan.

Dalam *Chamber of Deputies*, jumlah total keanggotaan yaitu 80 orang, dengan perincian 53 kursi dipilih langsung mewakili partai politik, 24 kursi dikhususkan untuk perempuan dan yang memilih pun harus

⁴Vanessa Farr (2000), *Woman combatant and the mobilization, disarmament and reintegration process in Rwanda*, New York. Diunduh dari <http://www.unesco.org> pada februari 2011.

⁵Dr. Rose Mukankomeje (1996), *Women and political Reconstruction in Rwanda*, Rwanda. Diunduh dari www.idea.int pada Februari 2011.

⁶Elizabeth Powley (2006), *Rwanda: The Impact of Women Legislators on Policy Outcomes Affecting Children and Families*, New York. Diunduh dari www.unicef.org pada Desember 2010.

perempuan, 2 kursi untuk *The National Youth Council*, 1 kursi untuk *the Federation of the Associations of the Disabled*.⁷

Untuk lebih jelasnya, konstutusi mengenai keanggotaan dari *Chamber of Deputies* tertuang dalam konstitusi Rwanda sebagai berikut:

The Chamber of Deputies is composed of eighty (80) members as follows:

- 1. fifty-three (53) are elected in accordance with the provisions of Article 77 of this Constitution;*
- 2. twenty-four (24) women; that is: two from each Province and the City of Kigali. These shall be elected by a joint assembly composed of members of the respective District, Municipality, Town or Kigali City Councils and members of the Executive Committees of women's organizations at the Province, Kigali City, District, Municipalities, Towns and Sector levels;*
- 3. two (2) members elected by the National Youth Council;*
- 4. one(1) member elected by the Federation of the Associations of the Disabled.*
(Constitutions, Article 76)⁸

Dalam pemerintahan Paul Kagame periode Tahun 2003, terdapat 9 wakil perempuan dari total 26 kursi di parlemen. Ini mencakup 35% keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Konstitusi yang menyebutkan keterwakilan perempuan tersebut tertuang dalam kutipan berikut:

"The State of Rwanda commits itself that women are granted at least 30 percent of posts in decision making organs" (Constitution, Article 9 [4]). The 24 members in the senate "at least thirty per cent (30%) of whom are women" are indirectly elected by various electoral colleges, which "shall take into

⁷Gumisai Mutume (2004), *Quota systems allow more women to gain elected*, New York. Diunduh dari www.africarecovery.org pada Januari 2010

⁸Jurist Africa Organization, *the Constitutions of the Republic Rwanda*, diunduh dari www.jurisafrica.org pada February 2011.

account national unity and equal representation of both sexes"
(*Constitution, Article 82*).⁹

Keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan pengamatan mereka terhadap kebijakan Negara Uganda yang menggunakan sistem kuota untuk menjamin partisipasi perempuan di negaranya dan melihat keberhasilan yang dicapai di Afrika Selatan karena menggunakan sistem ini, maka Rwanda pun mulai menggunakan sistem kuota tersebut.¹⁰

Pemerintah Rwanda juga memiliki kementerian yang mengurus urusan gender dan keluarga, yaitu *The Ministry of Gender and Family Promotion*. Di kementerian ini, struktur organisasi telah tercipta dari tingkat lokal hingga nasional, sehingga perempuan dapat bersama-sama membicarakan masalah mereka dan mencoba menemukan solusi terbaik untuk mereka.¹¹

Rekonstruksi Negara Rwanda pasca genosida sangatlah sulit untuk dimulai. Untuk membujuk masyarakat duduk di meja perundingan secara khusus tidaklah mudah, namun mereka memiliki komitmen yang sangat gigih dan mereka berharap akan mampu membawa hasil yang memuaskan.

Keuntungan yang sangat signifikan jelas didapatkan oleh perempuan di bidang politik. Hal ini dikarenakan adanya jaminan konstitusi yang diberikan pemerintah terhadap perempuan dengan

⁹Quota Project Organization, *Rwanda*, diunduh dari www.quotaproject.org pada februari 2011.

¹⁰ Tsjeard Bouta, Georg Frerks, Ian Bannon, *Gender, conflict, and development*, Washington, The World Bank, 2005, hal. 89

¹¹Richard Cracknell, Richard Groat and John Marshall (2009), *Women in Parliament and Government*, New York. Diunduh dari www.law.emory.edu pada Februari 2011.

memberikan kuota di badan legislatif. Pemerintah Rwanda, khususnya Front Patriotik Rwanda (RPF) secara khusus telah menyertakan perempuan dalam program pemulihan pasca genosida dan rekonstruksi Negara.¹²

B. Peran Perempuan di Parlemen

Perempuan Rwanda ingin memberikan citra positif di bidang politik dalam rangka membangun kembali negaranya yang telah hancur akibat genosida 1994. Mereka ingin memastikan solidaritas di antara perempuan Rwanda tanpa membedakan asal suku mereka. Mereka ingin perempuan lebih terlibat dalam badan pembuatan keputusan. Mereka telah memastikan bahwa seluruh perempuan Rwanda mengetahui hak mereka dan dapat mengajarkan anak-anak mereka akan dasar-dasar hak asasi manusia.¹³

Immaculate Ingabire (gambar 3.1) adalah seorang kordinator *Rwanda's National Coalition* yang melawan kekerasan terhadap perempuan. Dia merupakan salah satu perempuan yang menyumbangkan tenaga dan usahanya dalam pembangunan perdamaian di Rwanda, dengan organisasinya dia memastikan dan mengusahakan agar kekerasan terhadap perempuan di Rwanda dapat dihentikan dengan jalan memberikan

¹²Bill Fraser (2001), *Good Governance Strategy Paper*, Government of Rwanda, www.rwanda1.com diunduh pada Februari 2011

¹³Luc Reyhler, Thania Paffenholz, *Peacebuilding: a field guide*, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2001, hal. 97

konseling dan bimbingan serta menyediakan sarana advokasi untuk para perempuan.

Gambar 3.1
Immaculate Ingabire diruang kerjanya.



Sumber: www.newtimes.co.rw diakses pada Februari 2011

Pada gambar 3.2, terlihat usaha yang dilakukan oleh para perempuan Rwanda untuk memajukan skill dan kemampuan mereka demi mencerdaskan kehidupan bangsanya. Bersama-sama mereka belajar mengenai politik, perdamaian, mediasi dan pemerintahan. Dalam suatu seminar yang diadakan pemerintah reuni nasional pada tahun 1999.

Gambar 3.2
Perempuan Rwanda sedang belajar mengenai politik, perdamaian, mediasi dan pemerintahan pada tahun 1999



Sumber: www.alarm-inc.org diakses pada Februari 2011

Perempuan Rwanda juga berkampanye untuk perdamaian dengan menunjukkan kepada setiap orang khususnya kaum lelaki dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada stabilitas politik tanpa perdamaian jangka panjang seperti yang diceritakan pada gambar 3.3,

Gambar 3.3

Perempuan berkampanye menyerukan perdamaian pada sebuah acara yang diadakan sebuah perkumpulan perempuan di Rwanda.



Sumber: www.survivors-fund.org.uk diakses pada Februari 2011

Sebagai contoh sukses kerja perempuan di bidang politik, terdapat DR. Rose Mukankomeje yang telah menjadi anggota Parlemen Rwanda sejak bulan Maret 1995. Dia adalah seorang anggota dari komisi ilmiah dan sosial pada *National Assembly*.

The Rwanda National Assembly memiliki total 13 perempuan dari keseluruhan 70 anggota parlemen sidang. Pada tahun 1996, perempuan-perempuan yang menjadi anggota Sidang tersebut membentuk *The Forum des Femmes Rwandaises*. Forum itu dimaksudkan untuk membantu proses perdamaian maupun untuk mengkampanyekan pada persoalan yang mempengaruhi perempuan dan hak asasi mereka.

DR. Rose Mukankomeje telah menjadi Presiden dari tersebut semenjak tahun 1996, selain itu dia juga bertindak sebagai anggota Perkumpulan Solidaritas-Kibuve¹⁴.

Seorang anggota parlemen, yang bernama Bernadette, ia adalah seorang pengacara sekaligus anggota parlemen. Dia menyakini bahwa perempuan tidak harus bergantung terhadap lelaki. Dia telah aktif dalam komunitas sosial Rwanda sejak 1991 dan saat kelompoknya menjadi target buruan pada masa genosida, Bernadette memutuskan untuk bergabung dengan RPF, dia mengatakan bahwa RPF memberikan ruang yang luas untuk partisipasi perempuan dalam segala bidang.

*“I became a member of the national executive committee of the RPF in 1998 and I led commissions on political and social affairs. I was also part of the association of genocide survivors and I always sat on the committee for human rights. On the political front, being a member of the RPF gives me a lot of opportunities to defend women’s rights because the party provides space for women.”*¹⁵

the first Minister of Women’s Affairs, Aloisea Inyumba, dulunya merupakan anggota Komisi Keuangan untuk RPF. Dia dijuluki “*founding mother*” dari isu gender oleh rakyat Rwanda pasca Genosida. Selain itu terdapat Letnan Kolonel Rose Kabuye yang merupakan perempuan veteran tentara RPF yang ikut berjuang dimasa genosida. Ia menyatakan bagaimana keterlibatan perempuan dalam genosida sebagai berikut:

¹⁴Elizabeth Powley (2004), *Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary*, Glen Cove, New York. Diunduh dari www.un.org pada Februari 2011

¹⁵Rakiya Omaar and Rachel Ibreck (2004), *Women Taking a Lead*, Rwanda. Diunduh dari www.womenforwomen.org pada Januari 2011.

“It started in Uganda, with the beginning of the [RPF’s] struggle men did not start alone. Because women were part of what was going on, the men started cooperating ... It spread like that ... women took [on] very big responsibilities. After the struggle, men realized women are hard working, they can do [anything].”¹⁶

Segera setelah tahun 1996, dengan dukungan dan orientasi dari Kementrian Urusan Perempuan, para perempuan mulai bekerja sama dalam melaksanakan pemilihan komite wakil rakyat, komite tersebut kemudian dikenal dengan sebutan komite nasional perempuan. Tujuan dari penyusunan komite tersebut adalah untuk menciptakan sebuah forum dimana perempuan dapat saling berbagi pandangan dalam permasalahan mereka dan menemukan cara untuk mengatasi penyelesaian masalah genosida yang sangat banyak. Menurut kutipan dari salah seorang anggota parlemen perempuan Berthe Mukamusoni menyatakan:

“Secara bertahap perempuan mulai membangun kepercayaan dengan mendatangi Ingando (kamp solidaritas) dan berbagi pengalaman. Pada awalnya saat Ingando dimulai, perempuan Hutu dan Tutsi akan saling sangat curiga dan penuh ketakutan tetapi pada akhirnya, mereka akan penuh oleh kasih sayang yang mengitari satu sama lain”¹⁷

Anggota parlemen perempuan di pemerintahan telah berusaha mengakhiri diskriminasi gender melalui pembuatan konstitusi baru sebelum dilaksanakannya pemilu 2003, mereka beropini bahwa

¹⁶Drude Dahlerup (1998), *Women in Parliament: Beyond Numbers*, Stockholm, Sweden. Diunduh dari www.womenwagingpeace.net pada Januari 2011.

¹⁷Africa Union Organization, *Testimony Rwanda*, diunduh dari www.africa-union.org pada February 2011.

representasi dalam bidang politik merupakan salah satu jalan menuju perbaikan hak-hak hukum perempuan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5, perempuan melobi agar hak-hak perempuan dibidang hukum dan warisan dapat dimasukkan kedalam konstitusi baru. Selain itu, mereka juga meyakinkan seluruh anggota parlemen bahwa keterwakilan perempuan dalam pemerintahan merupakan awal yang baik untuk sebuah proses pembangunan perdamaian Negara dimasa yang akan datang.

Gambar 3.5
Perempuan Rwanda yang bekerja sebagai anggota parlemen, mereka yang melakukan tugas melobi dan memperjuangkan hak-hak perempuan Rwanda.



Sumber: www.wunrn.com diakses pada Februari 2011

Pada akhir tahun 2000, mendekati akhir periode transisi pasca genosida, Rwanda menyusun konstitusi baru dan membentuk 12 anggota Komisi Konstitusi. Didalamnya terdapat 3 orang perempuan yang ikut berperan, salah satunya adalah Judith Kanakuze yang merupakan ahli bidang persamaan gender. Judith adalah seorang wakil dari masyarakat

sipil dalam komisi tersebut. Dia mewakili 2 kepentingan dalam komisi tersebut, yaitu dari konstituen utamanya dan perkumpulan Gerakan Perempuan Rwanda¹⁸.

Selain itu, dalam menindak lanjuti keadilan pasca genosida, Rwanda telah membentuk peradilan tradisional, yaitu peradilan rumput yang disebut GACACA. Dalam peradilan ini, setiap orang yang menjadi korban pelaku genosida diadili. Semua masyarakat dapat hadir di pengadilan ini. Keterwakilan perempuan dalam pengadilan ini mencapai 29% dari total pengadilan gacaca pada tiap provinsi. Pada pengadilan yang di ketuai oleh seorang perempuan, performanya lebih baik daripada yang diketuai oleh seorang lelaki¹⁹.

Sangatlah penting untuk mengingat bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinannya dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat sosial membawa visi baru untuk perempuan lainnya dalam rangka merekonstruksi kesatuan negaranya dan menegksiskan perdamaian.

Marie-Thérèse Mukamulisa, adalah seorang hakim Mahkamah Agung Rwanda. Dia adalah salah satu anggota komisi konstitusi Rwanda. Marie adalah salah satu dari banyak perempuan profesional yang berkontribusi dalam kampanye kesetaraan perempuan di Rwanda, dia

¹⁸Elisabeth Powley (2003), *Rwanda: Women Hold Up Half the Parliament*, New York. Diunduh dari www.mail-archive.com pada Februari 2011.

¹⁹Elizabeth Powley (2004), *Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary*, Glen Cove, New York. Diunduh dari www.un.org pada Februari 2011

mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan juga tidak kalah mutunya dengan pemimpin lelaki.

“We at the Supreme Court are fortunate to have a woman president as our head. We hope that through her, and also through the Ministry of Justice [also headed by a woman], that the population will see the accomplishments of women leaders for themselves. Little by little, women will benefit from the reputation of women who have proven that they are just as capable as men in leading successful political careers.”²⁰

Dengan banyaknya perempuan yang mengalami kondisi trauma pasca genosida, terdapat perempuan bernama Berthe Mukamusoni. Ia mengalami trauma yang amat sangat akibat kehilangan orang tuanya dalam genosida 1994. Namun ia harus mampu membangun kembali hidupnya dengan anak-anaknya, dengan usahanya tersebut ia diangkat menjadi wakil Gubernur pada 1995 dan pada tahun 2000 diangkat menjadi presiden *the National Women’s Council*.

“After the genocide, women had no choice. They had killed my husband. I had to earn a living and rebuild my life. How long could I remain traumatised? I have eight children, six boys and two girls. If I dwelt on death, it would mean the death of my children as well. I had to wake up and get to work for their well being and survival.”²¹

Pada Tahun 1996, masih dalam periode transisi pasca genosida, perempuan Rwanda yang berada di parlemen membentuk sebuah partai lintas kaukus. Yang dikenal dengan Forum Parlemen Perempuan (*Forum of*

²⁰Rakiya Omaar and Rachel Ibreck (2004), *Women Taking a Lead, Rwanda*. Diunduh dari www.womenforwomen.org pada Januari 2011.

²¹Ungei Organization, *The National Women Council*, diunduh dari www.ungei.org pada februari 2011.

Women Parliamentarians) yang dikenal dengan singkatan Perancis FFRP. Anggotanya adalah seluruh perempuan yang berada di *upper house* maupun *lower house*, perwakilan partai politik, dan perempuan yang terpilih duduk di parlemen karena dipilih oleh suara perempuan. Mereka bekerja untuk isu-isu yang penting mengenai perempuan. Seorang anggota parlemen, Connie Bwiza Sekamana mengungkapkan:

*“When it comes to the Forum, we unite as women, irrespective of political parties. So we don’t think of our parties, [we think of] the challenges that surround us as women.”*²²

Pada tahun pertama keberadaannya, fokus dan tujuan utama forum ini adalah untuk mengadvokasi perempuan Rwanda dan membangun kapasitas anggotanya. Anggota FFRP melihat pekerjaan mereka sebagai salah satu kontribusi politik demi membangun negaranya dan mengangkat harkat dan martabat perempuan Rwanda. seperti dikutip dari Bwiza Sekamana seorang anggota FFRP:

*“Changing the concept and thinking of the Rwandese society” and combating the “mentality whereby ... to be a woman in our society meant to be a nobody.”*²³

Dalam beberapa tahun terakhir masa pemerintahan transisi, forum ini menjadi lebih memfokuskan diri terhadap urusan legislative dan pelayanan konstituen. Seperti meninjau ulang hukum yang ada,

²²Elizabeth Powley (2004), *Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary*, Glen Cove, New York. Diunduh dari www.un.org pada Februari 2011

²³Parliament Government Rwanda, *Rwandan Women Parliament*, diunduh dari www.parliament.gov.rw pada February 2011.

memperkenalkan amandemen baru mengenai keterwakilan perempuan dalam dunia politik, mengubah undang-undang yang diskriminatif, melakukan pertemuan dan pelatihan dengan kelompok perempuan, dan memberi saran-saran mengenai hukum dan keadilan.

Salah satu keunggulan yang dihasilkan oleh forum ini adalah mereka telah berhasil menggunakan proses konsultasi baik internal maupun eksternal dengan konstituen. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa berhubungan dengan konstituen adalah kekuatan legislator perempuan internasional. Secara khusus, FFRP memperkenalkan pekerjaan mereka melalui kunjungan lapangan sebagai metodologi untuk menginformasikan pekerjaan mereka dan melakukan riset. Liberate Kayitesi, seorang anggota parlemen menjelaskan:

“Recently we conducted some field tours and we went in different centers for vulnerable children and orphanages. The aim was to see with our eyes what those centers were doing and find out ways and means to support them in their work.”²⁴

Mobilisasi yang dilakukan dalam gerakan perempuan di seluruh negara Rwanda dalam banyak hal dapat memudahkan perdamaian dan rekonsiliasi diantara rakyat Rwanda.

Keberhasilan proses perdamaian yang diusahakan perempuan terlihat bahwa mereka mampu memobilisasi para perempuan lain untuk ikut aktif dalam pembangunan negaranya melalui keikutsertaan mereka

²⁴*Ibid*

dalam forum-forum pemerintahan sehingga mereka mampu mengadvokasi hak asasi perempuan seperti yang telah diuraikan diatas.

C. Organisasi Berbasis Perempuan di Rwanda

Dalam perannya di bidang politik, perempuan mendapatkan dukungan dari pemerintah nasional, khususnya partai RPF yang diketuai oleh Presiden Rwanda Paul Kagame.

Terdapat organisasi-organisasi Non-Pemerintah yang berbasis perempuan dan telah diakui keberadaannya oleh pemerintah nasional Rwanda untuk mendukung kemajuan partisipasi perempuan di Rwanda demi berlangsungnya proses perdamaian di Rwanda. Beberapa diantaranya adalah:

1. *Association des Veuves du Genocide* (AVEGA-AGAZOHO)
2. *Pro-Femmes Twese Hamwe*
3. *Duterimbere*
4. *Rwanda Association of Media Women* (AFREM)
5. *Federation of African Women Peace Network* (FERFAP)
6. *Réseau des Femmes Ouvrant pour le Développement Rural* (*Network of Women Striving for Rural Development*)
7. *Rwanda Women Community Development Network*

8. *Rwanda Women's Network (RWN)*²⁵

Organisasi-organisasi diatas adalah contoh-contoh organisasi yang baru dibentuk setelah terjadinya peristiwa genosida 1994 dan telah berperan aktif dalam membantu perempuan Rwanda memajukan negaranya.

Diantara semua organisasi diatas, terdapat beberapa organisasi yang berperan sangat aktif dalam membantu perempuan Rwanda dalam rangka membangun kembali hidup dan meningkatkan peranan mereka dalam bidang politik.

Association des Veuves du Genocide (AVEGA-AGAZOHO) adalah sebuah organisasi non-profit yang disahkan pada 15 januari 1995. Awalnya didirikan oleh 50 orang janda korban genosida. Organisasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan dari korban genosida termasuk janda, anak yatim, remaja yang menjadi kepala keluarga, korban yang kehilangan anak-anaknya, orang papa dan orang-orang cacat.

Pro-Femmes Twese Hamwe adalah sebuah organisasi yang menyediakan platform dan struktur konsultasi untuk para anggotanya. Organisasi ini mensupport peranan perempuan dan mengklaim bahwa pembangunan Rwanda tidak akan berjalan mudah sebelum masalah hak-hak perempuan ditangani secara serius. Organisasi ini mengkonsentrasikan diri pada pembangunan integral seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, pembangunan jangka panjang seperti perdamaian dan rekonsiliasi,

²⁵Temesgen (2002), *Gender Issues*, Rwanda diunduh dari www.peacebuildingportal.org pada Februari 2011.

serta pemerataan pembangunan seperti keadilan dan pemberantasan semua hal yang berhubungan dengan diskriminasi.

Bergabungnya perkumpulan perempuan dari luar Rwanda dengan para perempuan Rwanda adalah prestasi besar. Setelah sesi lama negosiasi dan “perbincangan perdamaian” antara perwakilan perkumpulan perempuan dari luar negara dan perkumpulan domestik perempuan Rwanda, maka pada tahun 2002 tercapailah sebuah sensus, yaitu sebuah perkumpulan perempuan bernama *Pro-femme Twese hamwe* yang memfokuskan tujuan pada perdamaian. Telah disetujui bahwa perkumpulan tersebut berpedoman pada program perdamaian yang dikenal dengan sebutan *Action Campaign for Peace* (CAP). Perkumpulan ini merupakan langkah besar untuk membangun perdamaian dimasa depan.

ProFemmes, telah menerima hadiah perdamaian dari UNESCO sebagai forum anti kekerasan pada tahun 1996 dan penghargaan dari *The Peter Gruber Foundation* berupa *The Inaugural Women's Rights Prize* pada Tahun 2003²⁶. *ProFemmes* mampu memastikan bahwa kejahatan pemerkosaan pada Genosida 1994 telah menjadi kejahatan kemanusiaan, dan memastikan bahwa perempuan kini memiliki akses untuk menjadi ahli waris.

Gambar 3.4 menceritakan keadaan saat perempuan anggota ProFemmes sedang melakukan rapat membahas kejahatan genosida dan pemberdayaan perempuan Rwanda:

²⁶ProFemmes Twese Hamwe, *Achievement: Prizes Awarded*, Kigali. Diunduh dari www.profemme.org.rw pada Februari 2011.

Gambar 3.4
Anggota *ProFemmes* saat sedang melakukan rapat
pada tahun 2000.



Sumber: www.saharareporters.com diakses pada Februari 2011

Duterimbere merupakan organisasi non profit yang menyediakan kredit, pinjaman dan pelatihan kewirausahaan kepada seluruh perempuan Rwanda. Organisasi ini memulai proyeknya terhadap ibu angkat yang telah mengangkat anak-anak yatim korban genosida. Proyek ini disebut *Umuryango (family)*, organisasi ini menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang telah diangkat anak oleh ibu-ibu tersebut. Keanggotaan dari organisasi ini berasal dari dua suku yang bertikai saat genosida Hutu dan Tutsi. Mereka bekerja sama demi kebaikan seluruh rakyat Rwanda.

Rwanda Association of Media Women (AFREM) adalah organisasi non profit yang mengkonsentrasikan diri dalam bidang kekerasan terhadap perempuan. Peran intervensi mereka dalam pembangunan Rwanda terdapat pada bidang keefisienan komunikasi dan informasi, perang melawan HIV/AIDS, permasalahan gender dan pembangunan. Organisasi ini bekerja untuk mempopulerkan hak-hak perempuan dan membantu perempuan korban Genosida berbagi pengalaman saat tragedy genosida 1994. Tujuan keseluruhan dari organisasi ini adalah untuk mencapai

kesejahteraan sosial dan ekonomi perempuan, penguatan kapasitas ekonomi dan interaksi berkesinambungan dengan organisasi yang sejenis.

Federation of African Women Peace Network (FERFAP) merupakan jaringan perdamaian yang bergerak di 16 negara Afrika yaitu diantaranya Angola, Algeria, Burundi, Burkina Faso, Chad, Congo-Brazzaville, Liberia, Mali, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan and Zambia. Organisasi ini menyediakan platform yang penting dalam bidang advokat pendekatan sensitive gender yang didalamnya terdapat permasalahan resolusi konflik dan agenda peacebuilding nasional. Pembentukan organisasi ini merupakan langkah utama dari evolusi gerakan perdamaian perempuan Afrika.

Réseau des Femmes Oeuvrant pour le Développement Rural (*Network of Women Striving for Rural Development*) adalah network NGO yang terdiri dari 12 staff anggota. Organisasi ini memiliki pusat informasi yang biasanya digunakan untuk konsultasi semua organisasi perempuan, penelitian, pelajar dan penasehat nasional maupun internasional.

Rwanda Women Community Development Network adalah organisasi jaringan yang didirikan oleh General Assembly yang mewakili dari beberapa asosiasi, kelompok perempuan, aktifis, kementrian sosial, NGO lain, orang-orang dari dunia bisnis dan pendeta. Jaringan ini menyatakan bahwa sebagian besar populasi Rwanda merupakan perempuan yang bekerja sebagai petani dan peternak. Organisasi ini

meyakini bahwa setiap penduduk Rwanda memiliki obligasi yang sama dalam keikutsertaannya membangun negaranya.

Rwanda Women's Network (RWN) didirikan pada tahun 1997. Organisasi ini membahas perjanjian perdamaian sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di Rwanda. Promosi tersebut didedikasikan untuk perempuan agar dapat memungkinkan mereka menjadi peserta yang efektif dalam pembangunan negaranya di semua tingkat. Organisasi ini juga memfokuskan pada kekerasan terhadap perempuan²⁷.

Semua asosiasi tersebut didirikan dalam rangka membangun perdamaian dan merekonstruksi Rwanda pasca Genosida 1994. Perempuan telah memperjuangkan hak mereka sebagai salah satu korban utama kekerasan yang terjadi, dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam membangun kembali negaranya dengan ikut aktif dalam lembaga pemerintahan dan pembuatan undang-undang yang mengutamakan keterwakilan perempuan di bidang politik. Mereka mampu menggerakkan seluruh perempuan yang tersisa untuk bekerjasama tanpa membedakan asal etnis mereka.

Selain organisasi non pemerintahan yang telah disebutkan diatas, dalam tubuh pemerintahan Rwanda juga terdapat kementerian yang

²⁷Vanessa Farr (2000), *Women Combatants and the Demobilization, Disarmament and Reintegration In Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.grandslacs.net pada februari 2011

dikhususkan untuk mengurus tentang perempuan, yaitu *The Ministry of Family and Gender Promotion in The Prime Minister's* (MIGEPROF).

Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh MIGEPROF diantaranya pada bidang promosi gender dan pemberdayaan perempuan. Berikut adalah penjabaran dari prestasi yang telah dicapai MIGEPROF dalam memajukan dan meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik:

1. Gender Equality (persamaan gender).

Sesuai dengan misinya, MIGEPROF telah menempatkan kebijakan nasional gender. Kebijakan ini merupakan alat yang secara jelas mendefinisikan kebutuhan proses pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan sektor publik dan swasta, program-program pemerintah serta proyek dan anggaran pemerintahan.

Keinginan politik para perempuan yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan gender telah ditandai dengan penciptaan lingkungan kebijakan yang menguntungkan yang telah diterjemahkan dalam pencapaian sebagai berikut:

- a. Rwanda memiliki sebuah konstitusi yang didalamnya menjamin persamaan gender dan telah mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kapasitas pembuatan keputusan. Mandat ini menyampaikan bahwa setidaknya perempuan harus mengisi 30% suara.
- b. Telah ditetapkan undang-undang tentang warisan, kebebasan dalam berpolitik dan suksesi serta penguasaan

lahan yang disamakan dengan hak yang didapatkan laki-laki.

- c. Mendapatkan dukungan dari Dewan Perempuan Nasional dalam membantu memastikan bahwa mandate pemerintah tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dilaksanakan secara tepat.
- d. Penyebaran program kesetaraan gender telah dihasilkan di seluruh negeri melalui media, pelatihan gender dan kampanye-kampanye.
- e. Perempuan merupakan masyarakat yang aktif dalam perkembangan peradilan di Rwanda, mereka merupakan bagian dari persatuan dan rekonsiliasi pengadilan tradisional GACACA.

2. *Women Empowerment* (Pemberdayaan Perempuan)

- a. *Women Guarantee Fund* telah disahkan untuk membantu perempuan mendapatkan dana pinjaman.
- b. *Women Credit fund* telah disahkan untuk mendukung perempuan yang tinggal dipedesaan untuk membantu mereka dalam *income generating activities* (IGA)
- c. Inisiasi *Caisse Populaire d'Epargne et de Credit* (CAPEC) untuk membantu baik lelaki maupun perempuan, namun

lebih dikhususkan perempuan yang tinggal di pedesaan untuk manage keuangan mereka dan mendapatkan IGA

- d. Perluasan pelatihan kewirausahaan, presentasi dan pelatihan manajemen, proses produksi dan kerajinan tangan, pertanian dsb
- e. Meningkatkan akses decision making perempuan dalam segala bidang
- f. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai macam program pemerintahan seperti GACACA, HIMO, UBUDEHE dan sebagainya
- g. Mengekskusi komite-komite lain selain umugudu menjadi level nasional yang akan memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan dukungan dari pemerintah dan partner lainnya²⁸.

D. Sumbangan Perempuan Dalam Pemeliharaan Keamanan

Salah satu metode proses perdamaian yang digunakan dalam bidang keamanan yaitu bekerjasama dengan tentara pemerintah dan bernegosiasi mengenai penyerahan diri dengan damai dalam keadaan yang kondusif. Pejabat RDF (*Rwandan Defence Force*) berpangkat tinggi menyatakan:

²⁸Migeprof, *Gender Promotion; Achievement*. Kigali. Diunduh dari www.migeprof.gov.rw pada Februari 2011.

“Komandan pemberontak yang sebelumnya merupakan kepala sekolah di salah satu distrik provinsi Ruhengeri dibujuk oleh istrinya setelah banyak upaya yang tidak berhasil untuk meninggalkan pemberontakan itu. Akhirnya, dia menyerah dengan kekuatan 4.000 penyerang pada satu hari”²⁹

Kasus ini merupakan hal yang menarik untuk dipahami bahwa peran penting perempuan dalam menjaga keamanan dan ikut serta dalam penyelesaian konflik termasuk memastikan kembalinya keamanan di Negara mereka telah berhasil, salah satunya dengan metode disarmament.

Seorang kepala daerah distrik Ruhengeri menyatakan:

“Disamping sumbangan besar yang dibuat oleh perempuan pada restorasi keamanan di Ruhengeri, mereka juga ikut terlibat dalam kewaspadaan dan menyampaikan informasi untuk personil keamanan terkait dengan orang asing yang terlihat di daerah mereka.”

Seorang perempuan di provinsi Ruhengeri menambahkan bahwa, “sementara para pria melakukan penjagaan (amarondo) pada malam hari, para perempuan mengadakan penjagaan selama siang hari”³⁰

Secara tradisional, diyakini bahwa menjadi tugas pria untuk memperbaiki dan menjaga keamanan namun demikian pada sepuluh tahun terakhir, tren tersebut telah berubah dan lebih lanjut meningkatkan kepercayaan diri diantara perempuan yang mereka dapat lakukan apa yang pria juga dapat lakukan. Inilah salah satu bentuk keikutsertaan perempuan dalam menjaga stabilitas keamanan di bidang militer.

²⁹“Women peace and security in Rwanda”, diunduh dari www.dailystar.com pada februari 2011.

³⁰“An interview with the witness”, diunduh dari www.rwanda-genocide.org pada februari 2011.

Hal Ini menjadi bagian tanggung jawab baru perempuan telah datang untuk diperhitungkan setelah genosida tahun 1994 mereka telah datang untuk secara penuh menerima tanggung jawab dan peran membangun ulang negara mereka. Ini bermanfaat untuk dicatat bahwa apa yang telah ditekankan diatas bukanlah kejadian pemisahaan. Pada bagian lain negara seperti perempuan di daerah Cyangugu dan Gitarama bekerja tanpa lelah untuk memastikan keamanan daerah mereka. Seorang pimpinan perempuan dari perkumpulan perempuan NDABAGA di Cyangugu berkata,

“Para perempuan berlanjut untuk menyampaikan informasi kepada para suami dan saudara mereka yang masih tinggal di luar negara dan memaksa mereka untuk kembali secara damai dan juga menyumbang untuk menggagalkan serangan pemberontakan tahun 2001 dari DRC.”³¹

Perkumpulan NDABAGA, merupakan perkumpulan perempuan pencari perdamaian selama dan setelah konflik bersenjata menceritakan rahasianya. Mereka menggunakan metode bernegoisasi demi terciptanya kembali stabilitas keamanan di negaranya. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan perempuan eks-pejuang RPA (*Rwandan Patriotic Army*) dan eks-FAR (*Rwandan Army Forces*). Kanani Esperance, seorang anggota perkumpulan Ndabaga mengungkapkan,

“Para pejuang perempuan yang bergabung dengan RPA memiliki visi saling membantu dengan saudara mereka untuk

³¹United Human Right, *Women Security*, diunduh dari www.unitedhumanrights.org pada februari 2011.

memerdekakan negara dan memastikan perdamaian dan stabilitas untuk semua rakyat Rwanda,”³²

Perempuan yang didemobilisasi atau yang bertindak dalam kapasitas berbeda dengan RPA memutuskan untuk bekerjasama dalam perkumpulan Ndabaga dengan maksud seperti yang diungkapkan Apophia Batamuliza-presiden Perkumpulan Ndabaga

“Berlanjut untuk memainkan peran kami memastikan perdamaian dan rekonsiliasi dengan cara bertindak sebagai contoh yang baik dimanapun para anggota berada di seluruh Negara adalah tujuan kami!”³³

Para perempuan bekas anggota RPA dan eks-FAR yang bergabung dan bekerjasama merupakan langkah paling penting pencarian perempuan untuk kedamaian dan rekonsiliasi yang tahan lama di Rwanda. Seorang anggota senior Ndabaga Apopha Batamuliza mengatakan:

“Kami memiliki tugas untuk menunjukkan kepada saudara kami dan rakyat Rwanda lain yang mampu menyumbang untuk persatuan dan rekonsiliasi. Strategi kami adalah untuk perkumpulan kami jalankan pada semua bagian Negara, mengawasi kegiatan yang memperoleh penghasilan berbeda bagi anggota kami dan tetangga mereka. Saat rakyat berbagi kesempatan, mereka membangun rekonsiliasi diantara diri mereka”³⁴

Para anggota Ndabaga memiliki visi memberitahukan contoh ini kepada negara lain di sub-wilayah yang memiliki perang dan konflik. Fasilitas dengan mana perempuan membentuk perkumpulan dan

³²Inyange Organization, *Ndabaga*, diunduh dari www.inyange.com pada Februari 2011.

³³“Women in reconciliation role”, diunduh dari www.allafrica.com pada February 2011.

³⁴*Ibid.*

memecahkan masalah yang berbeda adalah mekanisme penting bagi perempuan untuk berperan pada perdamaian dan rekonsiliasi melalui tindakan yang nyata.

BAB IV

PERANAN PEREMPUAN RWANDA DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

Peranan perempuan di bidang ekonomi dan sosial akan lebih lanjut dideskripsikan dalam bab ini. Peranan mereka meliputi inisiatif sosial dan ekonomi, seperti bagaimana cara mereka merekonstruksi perekonomian dan kehidupan sosial serta apa saja kegiatan yang dilakukan mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan Negara.

A. Perempuan Mempelopori Inisiatif Sosial Ekonomi

Kemajuan besar di arena politik di Rwanda dapat disejajarkan dengan keberhasilan dan kekuatan perempuan dalam bidang bisnis dan perekonomian. Pasca genosida 1994, partisipasi tenaga kerja perempuan sangat besar, dengan tingkat partisipasi tinggi 79,5 %, dan lebih dari 50 % tenaga kerja. Perempuan Rwanda memimpin 42 % perusahaan. Mereka juga terdiri dari 58 % pengusaha dalam sektor informal yang terhitung 30 % dari GDP dan mereka membuat sumbangan besar kepada ekonomi negara melalui kegiatan usaha mereka yang didistribusikan dengan baik di seluruh sektor.¹

¹World Bank, *Rwanda Investment Climate Assessment (in preparation); Government of Rwanda & FIAS. Sources of Informal Activity in Rwanda.* Washington, DC. Diunduh dari www.economywatch.com pada februari 2011.

Partisipasi besar perempuan pada sektor informal ini digambarkan pula di negara paska konflik lain, seperti Liberia, dimana penelitian terbaru menemukan bahwa para pengusaha perempuan jauh lebih mungkin berhasil daripada pria untuk secara lengkap memiliki perusahaan informal.²

Banyak pengusaha perempuan yang relatif muda, dan banyak perempuan yang beralih usaha di tahun pertama setelah peristiwa genosida. Kenyataannya, dari para pengusaha kecil yang beroperasi di Rwanda, hampir 70 % didirikan dalam 10 % terakhir³. Berlawanan dengan tetangga Afrika Timur lainnya, banyak perempuan pengusaha merupakan pemilik utama atau memiliki mitra bisnis yang tidak melibatkan suami atau keluarga mereka. Pada kenyataannya dilapangan, wawancara dengan perempuan pengusaha menyebutkan tidak adanya pria dalam bisnis mereka.

Sebuah studi yang diadakan tahun 2002 tentang perempuan pengusaha menemukan bahwa mayoritas yang ikut serta dalam sektor ritel (82 %), dengan sisanya bergerak pada bidang jasa (16 hingga 17 %) dan manufaktur (1 hingga 2 %)⁴. Banyak dari bisnis mereka yang sukses dan

²Carmen Niethammer, Mark Blackden and Henriette von Kaltenborn-Stachau (2008), *Creating Opportunities for Women Entrepreneurs in Conflict-affected Countries*, Smart Lessons, IFC, Washington, D.C. Diunduh dari www.gesci.org pada februari 2011

³World Bank, *Rwanda Country Economic Memorandum. Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region*. World Bank, Washington, D.C. diunduh dari www.eac.int pada februari 2011

⁴Cited in World Bank, *Rwanda Country Economic Memorandum. Volume 2. Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region*. World Bank, Washington, D.C. diunduh dari www.eac.int pada februari 2011

berkembang besar, dan karena sejumlah studi kasus pada laporan ini menggambarkan, perempuan Rwanda makin bercabang pada sektor non tradisional seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).

Pemerintah Rwanda melihat kerjasama sebagai hal penting untuk perkembangan negara dan merancang kebijakan nasional untuk membantu gerakan pada tahun 2004 yang meliputi target untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam segala bidang.

Pada tahun 2004, ada sekitar 300 koperasi di Rwanda, yang mendapatkan dukungan dari pemerintah termasuk gagasan usaha, dasar pemikiran, pelatihan, dan saran saran pada persoalan seperti mengamankan keuangan. Kebijakan pemerintah ini telah membantu menciptakan pendapatan bagi perempuan, khususnya di daerah pedesaan, dan perempuan saat ini terdiri dari 50 hingga 60 % merupakan anggota koperasi⁵.

Rwanda telah membuat kemajuan besar dibidang pendidikan perempuan, tetapi lebih banyak lagi dibutuhkan untuk memastikan ketrampilan yang sesuai khususnya pada tingkat pendidikan tinggi dan pada bidang usaha. Negara itu mendapatkan MDG 2 yang berhubungan dengan paritas (perbedaan) pada pendidikan dasar dengan tingkat paritas jender 100 %. Sementara pada tingkat sekolah menengah, tingkat pendaftaran yang digunakan sedikit untuk kepentingan perempuan, saat ini

⁵Ministry of Commerce, Industry, Investments Promotion, Tourism and Cooperatives, *Sector Strategies Document: Cooperatives Sector*. Kigali. Diunduh dari www.uneca.org pada februari 2011

agak lebih tinggi untuk anak laki laki (10,6 %) daripada anak perempuan (9,5 %).⁶

Para perempuan yang merupakan tenaga kerja relatif berpendidikan baik. Rata rata, mereka memiliki 10 tahun pendidikan dibandingkan dengan 9 tahun pada pria⁷. Secara keseluruhan, Rwanda setara dengan Negara-negara tetangganya dalam mengkampanyekan kesetaraan jender dalam bidang pendidikan.

Perempuan menjadi kekuatan pendorong pengembangan sosial ekonomi di negara itu setelah genosida tahun 1994. Jaringan luas kelompok perempuan seperti NGO, perkumpulan dan koperasi pada tingkat akar rumput memainkan peran penting pada inisiatif pemberdayaan. Pengembangan sosial ekonomi digunakan sebagai titik masuk pada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi.

Perempuan berpartisipasi pada kegiatan mendapatkan penghasilan yang menyumbang pada pengembangan pemberdayaan sosial ekonomi yang pada gilirannya mencari jalan maju pada pembangunan berkelanjutan⁸.

Perempuan telah menyumbang banyak dalam kaitan dengan partisipasi pada repatriasi hak pengungsi dari tahun 1997. Pembagian film

⁶UNDP, Ministry of Finance and Economic Planning, *Economic Development and Poverty Reduction Strategy in Rwanda*. Kigali. Diunduh dari www.undp.org pada februari 2011.

⁷*Ibid*

⁸Beswick. D (1999), *Between State-building and Peace-building in post-genocide Rwanda: The 'peacebuilders contract' and implications for political settlement*. United Kingdom. Diunduh dari www.huntalternatives.org pada februari 2011

dokumenter repatriasi besar besaran para pengungsi menunjukkan secara proporsional sejumlah besar perempuan dan anak-anak. Salah satu pejabat dari kementerian urusan dalam negeri mengatakan:

“Looking at thousands of people returning from Congo and Tanzania, one’s attention is attracted by the large number of women. This was a significant step in restoring peace through return of refugees who had been held as hostages in neighboring countries by predominantly defeated genocidal forces. It was like so to speak responding to the olive branch extended by the government of National Unity of Rwanda”⁹

Berdasarkan data diatas, jelaslah bahwa keterlibatan perempuan dalam pengembangan perekonomian dan kerjasama sosial pasca genosida merupakan salah satu usaha mereka dalam keikutsertaannya pada proses perdamaian di negaranya.

B. Rekonstruksi Ekonomi dan Sosial oleh Perempuan

Pada upaya untuk merekonstruksi ekonomi yang tercerai berai oleh perang dan genosida tahun 1994, perempuan menyumbang secara signifikan pada inisiatif perpindahan yang dikembangkan oleh pemerintah Rwanda.

Genosida hampir secara menyeluruh merusakkan dasar pertanian negara dengan sejumlah besar pria yang terbunuh atau melarikan diri dari negara yang memenjaranya.

⁹Peter Uvin (1998), *Aiding Violence: the development enterprise in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.grandslacs.net pada February 2011

Perempuan di seluruh Rwanda menghidupkan kembali sejumlah kegiatan pertanian. Mereka menyediakan makanan untuk keluarga mereka baik makanan untuk program pekerjaan maupun hanya menghasilkan makanan dari tempat mereka sendiri.

Di seluruh daerah Rwanda, perempuan terlihat pada tempat pembangunan, bekerja berdampingan dengan pria atau kadangkala perempuan itu sendiri sedang mencoba untuk memecahkan tantangan sulit membangun rumah. Ini memecahkan mitos bahwa bila seorang perempuan membangun rumah maka akan terjadi kebocoran. Seorang anggota perkumpulan *Dohozanye* di Distrik Aman Provinsi Butane: “Saat ini kita bangga kepada setiap janda yang sekarang memiliki rumah sendiri, toilet dan dapur,¹⁰”

Paska genosida di Rwanda, kegiatan yang mendatangkan pendapatan di daerah pedesaan sebagian besar didominasi oleh kelompok perempuan. Pada era dimana Rwanda sebagai negara yang sedang mencoba untuk membangun kembali dirinya sebagai akibat dari genosida yang menyebabkan negaranya hancur, perempuan juga sama menderitanya. Ribuan kegiatan yang menghasilkan pendapatan diawali baik oleh kelompok perempuan itu sendiri seperti perkumpulan, koperasi, NGO dan CSO oleh pemerintah dengan dukungan dari pendonor¹¹.

¹⁰*Ibid*

¹¹Thérèse Nduwamungu (1998), *Women and Conflict in Rwanda*, Rwanda. diunduh dari www.caritas.org pada februari 2011

Pada kasus Rwanda, tampaknya beberapa tugas yang terlihat tidak dapat diatasi oleh perempuan ternyata malah mampu dengan sangat baik dikuasai oleh perempuan. Namun demikian, penting untuk mencatat bahwa sebagian besar data dari wawancara dengan responden berada pada cara pandang dimana pembangunan perdamaian dan upaya rekonsiliasi harus diwujudkan dengan praktik dan menguntungkan bagi masyarakat dan bukan hanya bersifat teoritis ataupun ideologis¹². Banyak dari hasil wawancara dengan responden di Rwanda mengungkapkan bahwa:

“Waktu untuk teori perdamaian dan rekonsiliasi telah usai; kini orang-orang perlu terlibat langsung dalam upaya tersebut dengan cara yang praktis yaitu bagaimana masyarakat akan memperbaiki kembali kerusakan yang disebabkan oleh genosida”¹³

C. Kegiatan Meningkatkan Perekonomian dan Kehidupan Sosial

Perempuan memang memiliki andil sendiri di bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, perempuan berusaha memutar otak untuk bisa menghidupi keluarganya yang tersisa tanpa suami mereka. Ini adalah salah satu bentuk peran perempuan dalam suatu proses perdamaian di bidang ekonomi, karena dengan terciptanya stabilitas ekonomi yang baik, maka kesejahteraan rakyat pun akan semakin tercapai. Itu merupakan salah satu jalan menuju kedamaian yang abadi di Rwanda.

¹²*Ibid*

¹³International Finance Corporation, *Women Entrepreneur in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.reddemujeresporunmundomejor.org pada februari 2011.

Begitu pula dibidang soial, perempuan Rwanda mampu memobilisasi perempuan lainnya bahkan suami-suami mereka untuk memulai belajar mempercayai satu sama lain. Mereka mulai membuka diri dan mampu hidup berdampingan bersama tanpa mengingat dan melabeli berasal dari suku apa mereka.

Salah seorang perempuan bernama Blandine Kamuyumbu, menjalankan sebuah koperasi di daerah Byumba. Koperasi ini berskemaan koperasi untuk para perempuan yang memiliki latar belakang kekerasan rumah tangga. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mendorong perempuan berdiri mandiri dan tidak tergantung kepada suami mereka.

Gambar 4.1

Blandine dan anggota koperasi *Ngwino Urebe Association*.



Sumber: www.reddemujeresporunmundomejor.org.
Diakses pada Februari 2011

Pada awal pembentukan koperasi ini, yaitu pada tahun 2001, anggotanya hanya berjumlah 36 orang dan semuanya adalah perempuan. Hasil produksi dari koperasi ini adalah juice buah marajuca yang telah dipasarkan di pasar-pasar tradisional Rwanda. Usaha koperasi ini didanai dan didukung oleh pemerintah nasional Rwanda¹⁴.

¹⁴*Ibid.*

Ruhinda, yang dulunya merupakan salah satu penduduk yang mengungsi dan kembali lagi ke Rwanda menceritakan bahwa:

“Setelah tahun 1994, ada rentang waktu dimana kami merasa harus menata ulang kehidupan kami. Dalam rentang waktu tersebut, ada waktu dimana kami harus berbagi dengan orang lain termasuk tetangga kami. Ketegangan yang tercipta akibat genosida masih dapat kami rasakan. Dalam kehidupan bertetanggapun kami harus berusaha untuk merestorasi kepercayaan kami. Namun, akibat kepercayaan diri kami, lambat laun kami mulai bercakap dengan para tetangga, bertukar bahan pokok seperti garam dan air. Dari situlah kami membujuk suami kami untuk mulai membuka diri. Disinilah lagi-lagi perempuan berperan dalam mendamaikan lingkungan tempat tinggal mereka.¹⁵”

Perempuan berpartisipasi secara besar besaran pada program alami perpindahan *Imidugudu* dimana perempuan menyediakan pekerja dan untuk pertama kalinya di sejarah Rwanda, mereka naik tepat di puncak atap untuk membangun rumah. Imidugudu adalah program pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal bagi para korban genosida yang telah kembali ke Rwanda. Sebagian perempuan terbukti mampu melakukan pekerjaan yang relatif baru. Ini di luar penentuan yang benar benar dan kebutuhan untuk bertahan. Berikut merupakan gambar keterlibatan perempuan dalam membangun imidugudu:

¹⁵*Ibid.*

Gambar 4.2
Perempuan terlibat secara langsung pembangunan infrastruktur
Imidugudu pada tahun 1994.



Sumber: www.metafro.be. Diakses pada February 2011

ASOFERWA, sebuah NGO Rwanda yang tujuannya memajukan pemberdayaan ekonomi, sangat terlibat dalam program perpindahan (*Imidugudu*) yang ditujukan untuk memindahkan orang yang terlantar, janda, orang tua dan orang yang kembali dengan beban kasus baru.

Organisasi ini terkenal karena telah membangun penampungan yang dinamakan Kampung Nelson Mandela di Ntarama (Nyamata di daerah Bugesera, provinsi Kigali Ngali), sebuah daerah yang mengalami kekejaman hebat pada genosida tahun 1994 dan tempat penampungan ini merupakan contoh kampung terpadu yang memiliki layanan sosial seperti air, listrik, pusat kesehatan, sekolah dasar, pasar, dll

“Kampung Penampungan Nelson Mandela sangat dikenal karena telah membangun sekolah dasar dimana para murid dari seluruh kampung dan penampungan di sekitarnya bersekolah, mereka adalah sejumlah anak yatim genosida. Karena sejumlah murid tersebut datang dari keluarga yang rentan, ASOFERWA membayar biaya sekolah agar mereka dapat bersekolah¹⁶,”

¹⁶International Finance Corporation, *Voices Of Women Entrepreneur*, Kigali. Diunduh dari www.ppu.org.uk pada Februari 2011

Kampung penampungan ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban genosida, terutama anak yatim, janda dan korban lainnya.

Salah satu contoh yang menyolok adalah bagaimana pembangunan perdamaian dan upaya rekonsiliasi dibidang ekonomi secara jelas ditunjukkan pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dikenal dengan proyek “*Cows of Peace*” di provinsi Byumba seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3:

Gambar 4.3
proyek “*Cows of Peace*” di provinsi Byumba



Sumber: www.breakthroughpartners.org. diakses pada Februari 2011

Proyek ini diawali tahun 2001 oleh pemerintah Rwanda dan USAID untuk mendukung kelompok rentan untuk mendapatkan peningkatan ternak sapi agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Salah satu perkumpulan yang didukung oleh proyek ini adalah perkumpulan Girramata yang diterjemahkan sebagai “*may you have milk*” di pusat Byumba dan terdiri dari 31 anggota, 19 diantaranya

perempuan. Yang unik dari perkumpulan ini adalah keanggotannya yang dibuat oleh janda korban genosida; istri orang yang dipenjarakan yang didakwa telah melakukan genosida dan bahkan tentara yang didemobilisasikan.¹⁷ Proyek ini merupakan proyek baru yang dicanangkan setelah peristiwa genosida 1994, sebelumnya perempuan dianggap tabu untuk memelihara sapi.

Christine Mukahumure, seorang anggota perkumpulan Giramata adalah janda yang telah mampu membayar biaya sekolah anaknya di SMP di barat Provinsi Kibuye dan tujuh anak lain di sekolah dasar provinsi Byumba sebagai hasil dari pendapatan sapi. Christine mendapatkan manfaat pertama kali dari proyek “*Cows of Peace*” di Byumba dan dia menamakan sapinya “*Umugeni Mwiza*” yang berarti “*the best bride*”

“Saya adalah orang yang pertama diuntungkan oleh proyek di perkumpulan kami. Setelah menerima sapi itu, saya menyadari bahwa satu keluarga tetangga sedang mengalami kemiskinan. Anak anaknya menderita sakit dan kurang makan dan seluruh keluarganya hidup dalam susunan pengganti sementara (blinde). Saya mulai memberi mereka 4 liter susu setiap hari gratis tetapi saya merasakannya ini harganya mahal dan boros. Sapi saya menghasilkan anak sapi yang tidak dapat berjalan sehingga saya memutuskan untuk menjual murah dan membangun struktur penggembalaan nol agar mereka dapat siap dan lebih mahir. Akhirnya, keluarga ini mendapatkan sapi dan saat ini, mereka telah membuat rumah beratapkan besi dan dapat membayar biaya sekolah untuk anak anak mereka kelihatan semakin sehat. Saya dapat tidur nyenyak karena saya tahu bahwa orang tersebut mempunyai sesuatu untuk dimakan, minum susu dan menjualnya

¹⁷Thérèse Nduwamungu (1998), *Women and Conflict in Rwanda*, Rwanda. diunduh dari www.caritas.org pada februari 2011

sebagian agar dapat membeli barang barang yang mereka tidak mampu beli sebelumnya”¹⁸.

Contoh kegiatan seperti diatas itu telah membawa orang dari isolasi dan memungkinkan bagi mereka datang bersama dan berbagi gagasan dan telah membawa manfaat kolektif pada masyarakat di daerah itu. Sapi juga dapat membuat lingkungan masyarakat sehat. Karena setiap anggota masyarakat merupakan potensi untuk mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung, setiap orang merasa bertanggung jawab untuk keamanan sapi itu. Para tetangga bertemu pada petang hari untuk berbicara dan bersama di rumah dimana sapinya dikandangkan (*Gutaramoira Inka*). Secara budaya, ini merupakan forum berbagi upaya untuk membangun kepercayaan satu sama lain serta melatih solidaritas dan sejauh ini kegiatan tersebut telah menyumbangkan pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi.¹⁹

Sapi sapi tersebut telah meningkatkan status perempuan pada perkumpulan yang diikutinya. Sebelum masuknya kegiatan ini, pernah ada anggapan skeptis bahwa perempuan tidak mampu mengelola sapi karena secara tradisional mengelola sapi dianggap pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan hanya cocok untuk kaum lelaki maka dahulu sapi merupakan aset berharga bagi budaya tradisional Rwanda. Asisten kesehatan hewan setempat mengungkapkan bahwa:

¹⁸International Finance Corporation, *Women Entrepreneur in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.reddemujeresporunmundomejor.org pada februari 2011.

¹⁹*Ibid*

“Perempuan telah terbukti dapat mengurus sapi sapi itu lebih baik daripada pria karena kami telah mencatat bahwa sapi sapi itu kelihatan lebih sehat dan lebih produktif daripada yang dikelola oleh para pria”.

Sapi memiliki hubungan keluarga yang stabil dimana konflik keluarga telah berkurang. Dengan masuknya peraturan baru hak milik yang pemerintah tegakkan pada tahun 1999, sekarang perempuan dapat memiliki sapi. Secara tradisional, sapi memainkan peran penting dalam pemecahan konflik dan Rwanda pasca-genosida; sapi sapi itu sekarang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan perdamaian dan rekonsiliasi diantara masyarakat yang diakibatkan oleh genosida. Josee Uwalya, persiden Perkumpulan Guramata mengungkapkan:

“Di masyarakat kami, sangat umum untuk percaya bahwa orang yang berasal dari Byumba (Abakiga) memiliki standar kebersihan yang buruk dan oleh karenanya tidak dapat dengan tepat mengelola usaha peternakan, sementara yang berasal dari daerah Buganza (Abanyabuganza) lebih terbiasa dengan barisan belakang ternak yang dipahami sebagai orang malas. Namun demikian kemahiran peningkatan sapi di Byumba telah merubah pemahaman yang salah itu. Peningkatan sapi itu telah dibagi pada rumah tangga individu pada masyarakat yang tidak menerima apakah keuntungan Bahutu, Batutsi, atau Batywa”²⁰

Keberadaan ternak sapi tengah membawa dimensi pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi lain karena kegiatan seperti itu memungkinkan masyarakat mengawali pemahaman dukungan bersama yang kuat. Sejumlah anggota Perkumpulan Giramata telah melakukan

²⁰Hawa Noor Mohammed, *Women and Peace Building*, Germany, Grin Publishers, 2003, hal. 14.

inisiatif memberi sumbangan pada narapidana di penjara provinsi Byumba dengan susu dan makanan. Christine Mukahumure menjelaskan,

“Kami telah sukarela mengambil Susu dari narapidana sebagai cara menyiapkan mereka berubah secara positif sebelum mereka bebas dari penjara. Ini adalah gerakan yang sangat besar karena susu adalah makanan berharga bagi budaya Rwanda. Pelajaran paling penting dari kasus ini adalah bahwa perempuan telah sangat berperan bagi pembangunan perdamaian dan proses rekonsiliasi melalui inisiatif sosial ekonomi.”

Dari data diatas dapat diketahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan Rwanda di bidang social dan ekonomi dalam partisipasinya pada proses perdamaian pasca konflik genosida. Keikutsertaan mereka bertujuan agar stabilitas perekonomian dapat berjalan dan kehidupan social mereka dapat kembali berjalan normal, sehingga diharapkan perdamaian abadi akan berlangsung di Rwanda.

BAB V

KESIMPULAN

Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Tanpa menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi.

Peristiwa genosida 1994 yang terjadi di Rwanda berlangsung selama 100 hari sejak terbunuhnya Habyarimana yaitu pada 6 April 1994 sampai dengan pertengahan Juli 1994. Peristiwa ini memberikan dampak yang luar biasa mengerikan terhadap para perempuan di Rwanda.

Terdapat pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa ini diantaranya *Interahamwe*, *Impuzamugambi*, suku Hutu, suku Tutsi, pasukan perdamaian PBB, Front Patriotik Rwanda dan lain sebagainya. Pihak-pihak diatas merupakan tokoh utama dalam peristiwa Genosida 1994.

Peran perempuan dalam peristiwa Genosida, bukan hanya sebagai korban, namun juga sebagai salah satu aktor utama pelaku pembantaian. Mereka bekerja sama dengan para pemberontak dan ikut dalam beberapa kegiatan penyiksaan.

Dalam peranannya sebagai agen *peacebuilding* pasca Genosida 1994, perempuan berperan besar dalam beberapa bidang utama. Diantaranya dalam bidang Politik, Sosial dan Ekonomi.

Usaha mereka dalam merekonstruksi negaranya didukung penuh oleh pemerintahan Presiden Paul Kagame, yang merupakan ketua RPF. yaitu kelompok yang mempertahankan Rwanda dari serangan *massacred* ekstrimis Hutu. Pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk para perempuan Rwanda yaitu mengikutsertakan 30% suara dan kedudukan mereka dalam lembaga pemerintahan nasional dan regional.

Kegiatan perempuan dalam bidang politik pada periode 1994-2004 tersebut terlihat dari hasil yang mereka peroleh. Mereka melobi agar hak-hak perempuan dibidang hukum dan warisan dapat dimasukkan kedalam konstitusi baru. Selain itu, mereka juga meyakinkan seluruh anggota parlemen bahwa keterwakilan perempuan dalam pemerintahan merupakan awal yang baik untuk sebuah proses pembangunan perdamaian Negara dimasa yang akan datang. Kini mereka memiliki hak-hak yang sebelumnya merupakan larangan yang tidak boleh dimiliki oleh perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja seperti kaum pria, hak mendapatkan warisan dari kerabat maupun suami mereka dan hak keadilan.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan mereka dalam membangun perdamaian jangka panjang di Negeranya, perempuan Rwanda mendirikan berbagai organisasi berbasis perempuan dan perkumpulan perempuan.

Contohnya seperti forum parlemen perempuan, *Pro-Femmes Twese Hamwe*, AVEGA-AGAZOHO, AFREM, FERFAP, Network of Women Striving for Rural Development, RWN dan sebagainya.

Organisasi-organisasi tersebut diatas merupakan organisasi Non-Pemerintah yang sebagian besar beranggotakan perempuan, namun telah dilegitimasi dan diakui keberadaannya oleh pemerintahan Rwanda. Tujuan utama dari organisasi-organisasi tersebut adalah untuk menyatukan perempuan Rwanda di seluruh negeri, membuat mereka yang dulunya merupakan pelaku genosida agar dapat diterima lagi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bersama-sama membangun infrastruktur dan tatanan sosial yang telah hancur akibat Genosida 1994..

Dalam bidang ekonomi, mereka juga berpartisipasi pada kegiatan mendapatkan penghasilan yang menyumbang pada pengembangan pemberdayaan sosial ekonomi yang pada gilirannya mencari jalan maju pada pembangunan perdamaian berkelanjutan. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan menyekolahkan anak-anak mereka serta membantu tetangga-tetangga mereka yang masih miskin dan menderita malnutrisi.

Dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan tatanan sosial, para perempuan telah berhasil memobilisasi perempuan lainnya untuk terus bertahan hidup dan menyambung hidup mereka. Pada saat sebelum peristiwa genosida, janda memiliki konotasi yang buruk di mata masyarakat, namun saat ini, mereka mampu membuktikan bahwa janda

ataupun korban perkosaan dan kekerasan pada saat genosida mampu membiayai anak-anak mereka dan menunjukkan prestasi mereka.

Berdasarkan data-data yang telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran perempuan Rwanda dalam proses *peacebuilding* pasca Genosida 1994 di Rwanda periode 1994-2004 telah menunjukkan kemajuan pembangunan perdamaian yang signifikan baik secara kualitas dan kuantitas dalam bidang Politik, Ekonomi maupun Sosial di negaranya.

Keberhasilan perempuan dalam keikutsertaan mereka yang didukung penuh oleh pemerintah Rwanda seharusnya dapat dijadikan contoh teladan bagi negara-negara lain yang memiliki latar belakang konflik yang merugikan perempuan. Perempuan patut diberikan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan kaum lelaki.

Daftar Pustaka

Buku

Bouta, Tsjeard, Georg Frerks, Ian Bannon, *Gender, conflict, and development*, Washington, The World Bank, 2005.

Porter, Elisabeth J, *Peacebuilding: women in international perspective*, New York, Routledge, 2007.

Reychler, Luc, Thania Paffenholz, *Peacebuilding: a field guide*, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2001

Mohammed, Hawa Noor, *Women and Peace Building*, Germany, Grin Publishers, 2003.

Spalding, Frank, *Genocide in Rwanda*, The Rosen Publishing group, New York, 2009.

Artikel Website

“An interview with the witness”, diunduh dari www.rwanda-genocide.org pada februari 2011.

“Rwandan Women Surviving Genocide now Face AIDS”. Diunduh dari www.afrol.com pada Desember 2010.

“The Government of the Republic Rwanda”, diunduh dari www.safariafrica.com pada februari 2011.

“Women in rekonsiliation role”, diunduh dari www.allafrica.com pada February 2011.

“Women peace and security in Rwanda”, diunduh dari www.dailystar.com pada februari 2011.

Jurnal

Africa Union Organization, *Testimony Rwanda*, diunduh dari www.africa-union.org pada February 2011.

Arizki, Harsa (1998), *Memahami konflik dan resolusi konflik*, diunduh dari www.scribid.com pada Oktober 2010.

Balikungeri, M. (1999). *Good practices on dealing with ender Based Violence. Rwanda case: Paper presented to the UNIFEM Regional conference on Eliminating of Violence Against Women*. Nairobi, Kenya. Diunduh dari www.wilsoncenter.org pada Oktober 2010.

Cited in World Bank, *Rwanda Country Economic Memorandum. Volume 2. Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region*. World Bank, Washington, D.C. diunduh dari www.eac.int pada februari 2011

Cracknell, Richard, Richard Groat and John Marshall (2009), *Women in Parliament and Government*, New York. Diunduh dari www.law.emory.edu pada Februari 2011.

D, Beswick. (1999), *Between State-building and Peace-building in post-genocide Rwanda: The 'peacebuilders contract' and implications for political settlement*. United Kingdom. Diunduh dari www.huntalternatives.org pada februari 2011

Dahlerup, Drude (1998), *Women in Parliament: Beyond Numbers*, Stockholm, Sweden. Diunduh dari www.womenwagingpeace.net pada Januari 2011.

Des Forges, Alison (1995), *The Ideology of Genocide Issue: A Journal of Opinion*, Washington DC. Diunduh dari www.webster.edu pada Februari 2011

_____, Alison (1999), *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*, New York. Diunduh dari www.clgf.org.uk pada januari 2011.

Farr, Vanessa (2000), *Woman combatan and the mobilization, disarmament and reintegration process in Rwanda*, New York. Diunduh dari <http://www.unesco.org> pada februari 2011.

Fraser, Bill (2001), *Good Governance Strategy Paper*, Rwanda, diunduh dari www.rwanda1.com pada Februari 2011

Gendercide Organization, *the Survivor's story*, Rwanda. Diunduh dari www.gendercide.org pada February 2011.

Government of Rwanda and FIAS, *Sources of Informal Activity in Rwanda*, Washington, DC. Diunduh dari www.africom.mil pada februari 2011.

Hamilton, Heather B. (2000). *Rwanda's Women: The Key to Reconstruction*. Washington DC. Diunduh dari www.muhlenberg.edu pada Oktober 2010.

Human Rights Watch, *Rwanda: Struggling to Survive*, New York. Diunduh dari www.hrw.org pada January 2011.

_____, *Lasting Wounds: Consequences of Genocide and War on Rwanda's Chi* International Finance Corporation, *Voices Of Women Entrepreneur*, Kigali. Diunduh dari www.ppu.org.uk pada Februari 2011

_____, *Women Entrepreneur in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.reddemujeresporunmundomejor.org pada februari 2011.

Inyage Organization, *Ndabaga*, diunduh dari www.inyange.com pada Februari 2011.

International Finance Corporation, *Women Entrepreneur in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.reddemujeresporunmundomejor.org pada februari 2011.

Jansen, Hilde (1999), *Perempuan dalam situasi konflik*, diunduh dari www.komnasperempuan.or.id. Pada september 2010

Jurist Africa Organization, *the Constitutions of the Republic Rwanda*, diunduh dari www.jurisafrica.org pada February 2011.

Jurist Law, *Constitution, Government & Legislation in Rwanda*, diunduh dari www.jurist.law.pitt.edu pada februari 2011.

- Kerr, Joanna (1999). *Building women's leadership for the 21st century*. New York. Diunduh dari www.journalonline.tk pada Oktober 2010.
- Lemarchand, Rene (2000), *Rwanda and Burundi*, New York. Diunduh dari www.lpmjournal.com pada Februari 2011.
- Mamdani, Mahmood (2001), *when Victims become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda*, India. Diunduh dari www.usu.ac.id pada Februari 2011.
- Migeprof, *Gender Promotion; Achievement*. Kigali. Diunduh dari www.migeprof.gov.rw pada Februari 2011.
- Miller, Donald E. and Lorna Touryan Miller (2004). *Orphans of the Rwanda Genocide*. University of Southern California, Los Angeles. Diunduh dari www.ebooklibs.com pada September 2010.
- Ministry of Commerce, Industry, Investments Promotion, Tourism and Cooperatives, *Sector Strategies Document: Cooperatives Sector*. Kigali. Diunduh dari www.uneca.org pada februari 2011
- Mukankomeje, Rose (1996), *Women and political Reconstruction in Rwanda*, Rwanda. Diunduh dari www.idea.int pada Februari 2011.
- Mutamba, John, and Jeanne Izabiliza, (2004). *Republic of Rwanda: A Beijing conference ten-year evaluation report*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.find-docs.com pada September 2010
- Mutume, Gumisai (2004), *Quota systems allow more women to gain elected*, New York. Diunduh dari www.africarecovery.org pada Januari 2010.
- Musoni, Protas (2004), *Challenges of Managing Post Genocide Rwanda and How Rwanda Moved From Doomsday Scenario to Rebirth of A Nation*. South Africa. Diunduh dari www.columbia.edu pada Januari 2011.
- Nduwamungu, Thérèse (1998), *Women and Conflict in Rwanda*, Rwanda. diunduh dari www.caritas.org pada februari 2011.
- Niethammer, Carmen, Mark Blackden and Henriette von Kaltenborn-Stachau (2008), *Creating Opportunities for Women Entrepreneurs in*

Conflict-affected Countries, Smart Lessons, IFC, Washington, D.C.
Diunduh dari www.gesci.org pada februari 2011.

Omaar, Rakiya and Rachel Ibreck (2004), *Women Taking a Lead*, Rwanda.
Diunduh dari www.womenforwomen.org pada Januari 2011.

Organization of African Unity (OAU), *International Panel of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events: Special Report*, New York. Diunduh dari www.law.duke.edu pada Januari 2011.

Parliament Government Rwanda, *Rwandan Women Parliament*, diunduh dari www.parliament.gov.rw pada February 2011.

Peace Pledge Union (PPU), *Genocide Rwanda: the story*, diunduh dari www.ppu.org.uk pada February 2011.

Powley, Elisabeth (2003), *Rwanda: Women Hold Up Half the Parliament*, New York. Diunduh dari www.mail-archive.com pada Februari 2011.

_____ (2003), *Strengthening Governance: The role of women in Rwanda's transition, women, waging Peace*. Washington DC.
Diunduh dari www.efm.leeds.ac.uk pada Januari 2011.

_____ (2006), *Rwanda: The Impact of Women Legislators on Policy Outcomes Affecting Children and Families*, New York. Diunduh dari www.unicef.org pada Desember 2010.

ProFemmes Twese Hamwe, *Achievement: Prizes Awarded*, Kigali. Diunduh dari www.profemme.org.rw pada Februari 2011.

Quota Project Organization, *Rwanda*, diunduh dari www.quotaproject.org pada februari 2011.

Schirch, Lisa and Manjrika Sewak (2005), *the Role of Women in Peacebuilding*, India. Diunduh dari www.eastviewpress.com pada November 2010.

Sorensen, Birgitte (2000), *Perempuan dan Rekonstruksi pasca konflik: isu dan Sumber*, diunduh dari www.genderandpeacekeeping.com pada September 2010.

Sriyanto, Agus (2002), *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Bandung. Diunduh dari www.scribid.com pada Oktober 2010.

Survivors-Fund Organization, *Testimonies from Widows*, diunduh dari www.survivors-fund.org.uk diakses pada februari 2011.

Temesgen (2002), *Gender Issues*, Rwanda. diunduh dari www.peacebuildingportal.org pada Februari 2011.

The Avega-Agahozo Foundation Association of Genocide Widows, *Etude sur les violences faites aux femmes au Rwanda*. Kigali, Rwanda. Diunduh dari www.truth-out.org pada Oktober 2010.

_____, *Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.avega.org.rw pada Januari 2011.

Ungei Organization, *The National Women Council*, diunduh dari www.ungei.org pada februari 2011.

UNDP, Ministry of Finance and Economic Planning, *Economic Development and Poverty Reduction Strategy in Rwanda*. Kigali. Diunduh dari www.undp.org pada februari 2011

UNICEF, *Rwanda: Facts and Figures*, New York. Diunduh dari www.unicef.org pada Februari 2011.

United Human Right, *Women Security*, diunduh dari www.unitedhumanrights.org pada februari 2011.

Uvin, Peter (1998), *Aiding Violence: the development enterprise in Rwanda*, Kigali. Diunduh dari www.grandslacs.net pada February 2011.

Uwineza, Peace and Elizabeth Pearson (2009), *Sustaining Women's Gains in Rwanda: The Influence of Indigenous Culture and Post-Genocide Politics*. Kigali. Diunduh dari www.internationalpeaceandconflict.org pada februari 2011.

Widjajanto, Andi (2001), *Empat Tahap Resolusi Konflik*, Jakarta. Diunduh dari www.tempointeraktif.com pada Oktober 2010.

Women for women, *Rwanda*, dalam www.womenforwomen.org. Diunduh pada februari 2011

World Bank. *Rwanda Country Economic Memorandum. Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region*. World Bank, Washington, D.C. diunduh dari www.eac.int pada februari 2011

_____, *Rwanda Investment Climate Assessment (in preparation); Government of Rwanda & FIAS. Sources of Informal Activity in Rwanda*. Washington, DC. Diunduh dari www.economywatch.com pada februari 2011.